



LAPORAN KINERJA

PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PENGAMBENGAN

TRIWULAN I / 2024

PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA

PENGAMBENGAN

2024

LEMBAR PENGESAHAN



LAPORAN KINERJA (LKj)

TAHUN 2024

PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PENGAMBENGAN

Disetujui oleh :

Penanggung Jawab,
Kepala Pelabuhan Perikanan
Nusantara Pengambengan

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Andi Mannoengi', written over a horizontal line.

Andi Mannoengi

Jembrana, 26 April 2024

Disusun oleh :

Ketua Tim
Kepala Sub Bagian Umum

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Lukman Hadi', written over a horizontal line.

Lukman Hadi

KATA PENGANTAR

Mengacu pada RPJMN 2021 – 2024 dan RKT Tahun 2024, Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambangan senantiasa mengupayakan seluruh rencana aksi yang ada dilaksanakan secara optimal, efektif dan efisien, sebagaimana mestinya dengan harapan target indikator kinerja yang terdapat pada RPJMN dan RKT dapat tercapai dengan maksimal dan dilaporkan dalam bentuk Laporan Kinerja.

Laporan Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambangan Triwulan I Tahun 2024 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan prinsip akuntabilitas dan transparansi Ditjen Perikanan Tangkap kepada publik dengan mengacu kepada ketentuan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pencapaian pada Tahun 2024 merupakan pencapaian yang dijadikan dasar (base line) untuk menetapkan target pada tahun – tahun berikutnya yang kemungkinan besar akan berdampak pada reviu beberapa dokumen perencanaan Tahun 2024 namun akan konsisten hingga akhir RPJMN di tahun 2024. Laporan Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambangan Tahun 2024 ini disertai dengan Data Dukung Capaian sebagai rangkaian yang tidak terpisahkan dalam pelaporan kinerja ini.

Kami berharap apa yang disajikan dalam Laporan Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambangan Triwulan I Tahun 2024 ini dapat menjadi masukan kepada seluruh pihak terkait dalam memahami proses pelaksanaan tugas di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambangan pada Tahun 2024.

Jemberana, 26 April 2024

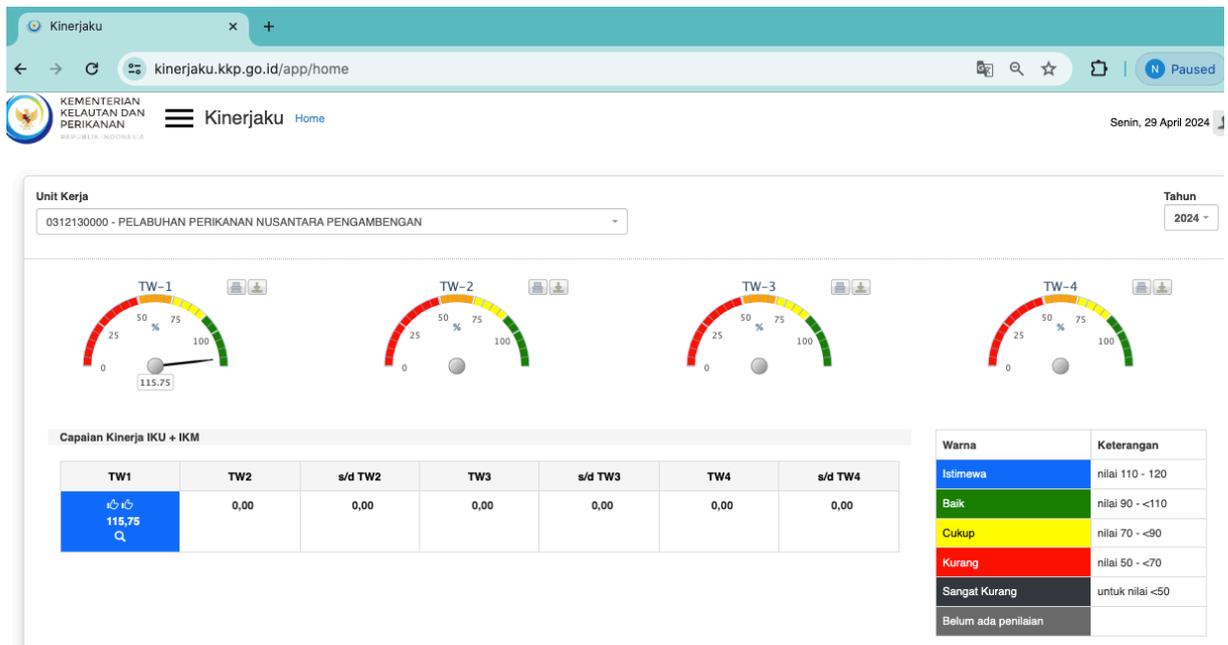
Kepala Pelabuhan



Andi Mannnojengi

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan Triwulan I Tahun 2024 menyajikan capaian strategis organisasi yang tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU). Dengan target sebesar Rp 15.094.595.000,- pada Tahun 2024, yang terealisasi sebesar Rp 3.068.596.737,- atau 20,32% dari total target penyerapan anggaran pada Triwulan I Tahun 2024. Sedangkan secara kinerja dengan hasil capaian sasaran strategis yang ditetapkan secara umum dan dapat memenuhi target dengan Nilai Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) ditambahkan dengan Nilai Indikator Kinerja (IK) sebesar **115,75%**. (Sesuai dashboard pada Aplikasi Kinerjaku pada Gambar 1)



Gambar 1. Dashboard pada aplikasi Kinerjaku Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan Triwulan I Tahun 2024

Dari hasil pengukuran kinerja Ditjen Perikanan Tangkap dan UPT Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan s/d Triwulan I Tahun 2024 melalui pencapaian target indikator kinerja yang di input ke dalam Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan KINERJAKU, diperoleh hasil indikator yang memenuhi target yaitu sebagai berikut :

1. IKS.01.01 Penerimaan PNBP Non SDA di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambengan (Rp Juta)
2. IKS.02.02 Volume produksi perikanan tangkap di PPN Pengambengan (Ton)
4. IKS.03.02 Tingkat Kinerja PPN Pengambengan (Nilai)
7. IKS.04.02 Nilai Pengendalian Lingkungan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambengan (Nilai)
8. IKS.05.01 Kapal Perikanan izin daerah yang memenuhi ketentuan (Kapal)
11. IKS.07.02 Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambengan (Persen)
18. IKS.07.09 Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambengan (Indeks)

Kemudian untuk indikator lainnya belum dinilai pada Triwulan I tahun 2024, antara lain :

3. IKS.03.01 Persentase permohonan perusahaan yang dianalisa dan/atau dievaluasi di PPN Pengambengan (Persen)
5. IKS.03.03 Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambengan (Persen)
6. IKS.04.01 Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambengan (Persen)
9. IKS.06.01 Persentase Peningkatan Pengetahuan Kompetensi dan Perlindungan Nelayan/Awak Kapal Perikanan (Persen)
10. IKS.07.01 Nilai Pembangunan Zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambengan (Nilai)
12. IKS.07.03 Nilai Rekonsiliasi kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambengan (Nilai)
13. IKS.07.04 Indeks Profesionalitas ASN di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambengan (Indeks)
14. IKS.07.05 Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Pelabuhan

Perikanan Nusantara Pengembangan (Persen)

15. IKS.07.06 Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan (Persen)
16. IKS.07.07 Nilai IKPA Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan (Nilai)
17. IKS.07.08 Nilai Kinerja Anggaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan (Nilai)

Pengukuran kinerja berbasis BSC merupakan hasil suatu penilaian yang didasarkan pada capaian indikator kinerja utama (pencapaian output) yang telah diidentifikasi untuk tercapainya sasaran strategis (pencapaian outcome). Sasaran Strategis (SS) tersebut kemudian dipetakan dalam suatu Peta Strategi berupa kerangka hubungan sebab akibat yang menggambarkan keseluruhan perjalanan strategi organisasi.

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
RINGKASAN EKSEKUTIF	iv
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Gambaran Umum	2
C. Tugas dan Fungsi	3
D. Struktur Organisasi	4
E. SDM Aparatur PPN Pengambengan	6
F. Sistematika Penyajian.....	9
BAB II. PERENCANAAN KINERJA	11
A. Pembangunan Nasional Visi Presiden.....	11
B. Pembangunan Kelautan dan Perikanan Visi KKP	13
C. Pembangunan Perikanan Tangkap	15
D. Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023.....	22
E. Rencana Aksi Penetapan Kinerja	25
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	26
A. Capaian Kinerja Organisasi	26
B. Akuntabilitas Keuangan	57
BAB IV. PENUTUP	62
A. Kesimpulan	62
B. Saran	63

DAFTAR TABEL

TABEL 1 Komposisi Pegawai Pelabuhan Tahun 2024.....	7
TABEL 2 Komposisi Pegawai Pelabuhan.....	7
TABEL 3 Rekapitulasi Pegawai Pelabuhan Tahun 2024.....	8
TABEL 4 Tabel Informasi Cascading.....	21
TABEL 5 Target Kinerja Pelabuhan.....	23
TABEL 6 Komposisi Target dan Realisasi Pagu Anggaran.....	24
TABEL 7 Matriks Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2024	26
TABEL 8 Rincian Capaian Indikator PNBPNP	29
TABEL 9 Perbandingan dengan Satker Lain.....	30
TABEL 10 Realisasi anggaran mendukung IKU.....	31
TABEL 11 Rincian Capaian Indikator Volume Produksi.....	32
TABEL 12 Perbandingan dengan Satker Lain.....	33
TABEL 13 Realisasi anggaran mendukung IKU.....	34
TABEL 14 Rincian Capaian Indikator Tingkat Kinerja	36
TABEL 15 Perbandingan dengan Satker Lain.....	37
TABEL 16 Realisasi anggaran mendukung IKU.....	37
TABEL 17 Rincian Capaian Indikator Nilai Pengendalian	40
TABEL 18 Perbandingan dengan Satker Lain.....	41
TABEL 19 Realisasi anggaran mendukung IKU.....	41
TABEL 20 Rincian Capaian Indikator Kapal Perikanan.....	43
TABEL 21 Perbandingan dengan Satker Lain.....	44
TABEL 22 Realisasi anggaran mendukung IKU.....	45
TABEL 23 Rincian Capaian Indikator Rekomendasi Hasil Pengawasan .	49
TABEL 24 Perbandingan dengan Satker Lain.....	50
TABEL 25 Realisasi anggaran mendukung IKU.....	51
TABEL 26 Rincian Capaian Indikator Nilai SKM	55
TABEL 27 Perbandingan dengan Satker Lain.....	56
TABEL 28 Realisasi anggaran mendukung IKU.....	56
TABEL 29 Pagu Anggaran	57
TABEL 30 Realisasi Keuangan	59

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 1 Dashboard Pada Aplikasi Kinerjaku.....iv	iv
GAMBAR 2 Struktur Organisasi Pelabuhan 6	6
GAMBAR 3 Dashboard Pada Aplikasi Kinerjaku..... 62	62

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan sebagai Unit Pelaksana Teknis dari Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap telah melaksanakan berbagai kegiatan guna mencapai tujuan pembangunan perikanan tangkap yakni meningkatkan produksi dan produktivitas usaha perikanan tangkap berbasis pengelolaan sumberdaya ikan yang berkelanjutan serta meningkatkan kesejahteraan nelayan. Enam kegiatan utama yang dilakukan yakni (1) pengelolaan sumberdaya ikan, (2) pembinaan dan pengembangan kapal perikanan, alat penangkap ikan dan pengawakan kapal perikanan, (3) pembangunan, pengembangan dan pengelolaan pelabuhan perikanan, (4) pengembangan usaha penangkapan ikan dan pemberdayaan nelayan kecil, (5) pelayanan usaha perikanan tangkap yang efisien, tertib dan berkelanjutan, dan (6) peningkatan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis.

Pelabuhan Perikanan merupakan tempat yang sangat strategis dan berperan sebagai rumah atau basis utama dalam melaksanakan berbagai program kerja Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap maupun tempat untuk mengimplementasikan peraturan perundangan yang berlaku pada lingkup KKP yang didasari 3 pilar Misi **KKP yaitu Kedaulatan (Sovereignty), Keberlanjutan (Sustainability) dan Kesejahteraan (Prosperity)**. Oleh karena itu, di dalam kawasan Pelabuhan harus tercipta suasana aman, nyaman dan kondusif agar dapat melaksanakan tugas dan fungsi pelabuhan perikanan secara baik.

Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN menuju tercapainya pemerintahan yang bersih (clean governance) dan bertanggungjawab (good governance) diperlukan pertanggungjawaban dari penyelenggara negara yang dilaporkan pada akhir tahun anggaran dalam suatu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang ditindaklanjuti dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah mengatur bahwa segala pelaksanaan pembangunan oleh instansi pemerintah agar dilaporkan secara *akuntable* sesuai dengan perjanjian kinerja yang ditetapkan meliputi pertanggungjawaban

penggunaan anggaran, keberhasilan yang dihasilkan, kegagalan pelaksanaan serta permasalahan-permasalahan yang dihadapi yang disertai dengan tindak lanjut pelaksanaan di tahun mendatang.

Tujuan dari pelaporan kinerja ini yakni: (1) untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya tercapai serta (2) sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya. Wujud pelaporan kinerja dimaksud adalah Laporan Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan yang disusun setiap tahun. Laporan Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan disusun oleh setiap unit kerja yang menyusun perjanjian kinerja yakni dengan menyajikan informasi tentang ; (1) uraian singkat tentang unit kerja, (2) rencana dan target kinerja yang ditetapkan oleh unit kerja dengan atasan unit kerja, (3) pengukuran kinerja, dan (4) evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran strategis atau hasil program dan kegiatan serta kondisi terakhir yang seharusnya. Oleh karena itu, Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan setiap tahunnya telah melakukan penyusunan Laporan Kinerja sebagaimana format yang telah ditetapkan. Ukuran keberhasilan dilakukan melalui pencapaian indikator kinerja utama (IKU) yang dapat menggambarkan kinerja utama Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan

B. Gambaran Umum

Pembangunan perikanan pada hakikatnya bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat nelayan sekaligus menjaga kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya serta meningkatkan kontribusi terhadap perekonomian nasional. Prasarana pelabuhan perikanan mempunyai andil yang cukup besar dalam menentukan keberhasilan pembangunan perikanan tangkap. Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan mempunyai peranan yang sangat strategis dalam usaha pengembangan usaha perikanan tangkap yaitu sebagai pusat atau sentral kegiatan perikanan terutama yang berada di wilayah Kota Jembrana Provinsi Bali. Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan selain merupakan penghubung antara nelayan dengan pengguna hasil perikanan laut, baik pengguna langsung maupun tidak langsung seperti pedagang, pabrik pengolah dan lain-lain, juga merupakan tempat berinteraksinya berbagai kepentingan masyarakat pantai yang bertempat di sekitar Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan. Selain itu Pelabuhan

Perikanan juga merupakan titik temu (terminal point) yang menguntungkan antara kegiatan ekonomi di laut dengan kegiatan ekonomi darat.

C. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan. Nomor 20/PERMEN-KP/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis Pelabuhan Perikanan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, dalam hal ini dipimpin oleh seorang kepala Pelabuhan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur Jenderal Perikanan Tangkap yang mempunyai tugas melaksanakan pengolahan dan pelayanan pemanfaatan sumber daya ikan serta keselamatan operasional kapal perikanan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambangan menyelenggarakan fungsinya:

1. Penyusunan rencana program dan anggaran, pemantauan dan evaluasi pelabuhan perikanan;
2. Pelaksanaan pengaturan keberangkatan, kedatangan dan keberadaan kapal perikanan di Pelabuhan Perikanan;
3. Pelaksanaan pelayanan penerbitan Surat Tanda Bukti Laporan Kedatangan dan Keberangkatan Kapal Perikanan;
4. Pelaksanaan pemeriksaan Log Book;
5. Pelaksanaan pelayanan penerbitan Surat Persetujuan Berlayar;
6. Pelaksanaan penerbitan Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan;
7. Pelaksanaan pengawasan pengisian bahan bakar;
8. Pelaksanaan pembangunan, pengembangan, pemeliharaan, pendayagunaan dan pengawasan serta pengendalian sarana dan prasarana;
9. Pelaksanaan fasilitasi penyuluhan, pengawasan dan pengendalian sumber daya ikan, perkarantinaan ikan, publikasi hasil penelitian, pemantauan wilayah pesisir, wisata bahari, pembinaan mutu serta pengolahan, pemasaran dan distribusi hasil perikanan;
10. Pelayanan jasa, pemanfaatan lahan dan fasilitas usaha;
11. Pelaksanaan pengumpulan data, informasi dan publikasi;
12. Pelaksanaan bimbingan teknis dan penerbitan Sertifikat Cara Penanganan Ikan yang Baik (CPIB);
13. Pelaksanaan inspeksi pembongkaran ikan;
14. Pelaksanaan pengendalian lingkungan di pelabuhan perikanan

Dalam rangka mendukung kegiatan pengelolaan tersebut pelabuhan perikanan mempunyai fungsi sebagai berikut:

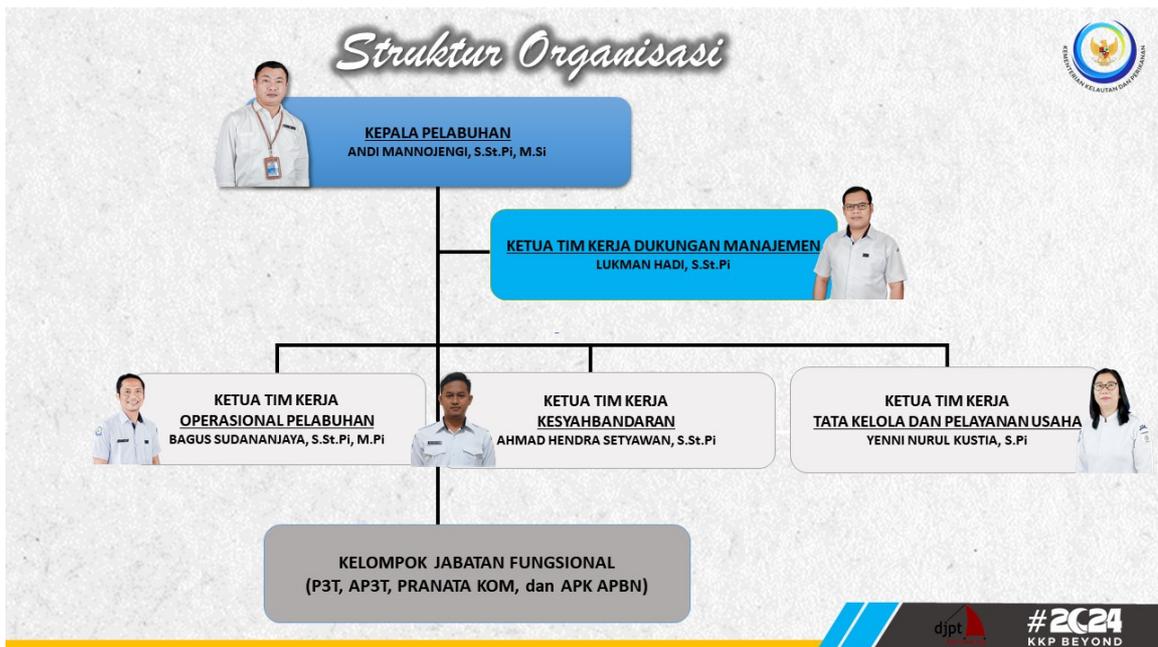
1. Fungsi pemerintahan yaitu fungsi untuk melaksanakan pengaturan, pembinaan, pengendalian, pengawasan, serta keamanan dan keselamatan operasional kapal perikanan di pelabuhan perikanan. Serta fungsi lainnya yang terkait dengan pengelolaan perikanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Fungsi pemerintahan tersebut meliputi: Pelayanan pembinaan mutu dan pengolahan hasil perikanan; Pengumpulan data tangkapan dan hasil perikanan; Tempat pelaksanaan penyuluhan dan pengembangan masyarakat nelayan; Pelaksanaan kegiatan operasional kapal perikanan; Tempat pelaksanaan pengawasan dan pengendalian sumberdaya ikan; Pelaksanaan kesyahbandaran; Tempat pelaksanaan fungsi karantina ikan; Publikasi hasil pelayanan sandar dan labuh kapal perikanan dan kapal pengawas kapal perikanan; Tempat publikasi hasil penelitian kelautan dan perikanan; Pemantauan wilayah pesisir; Pengendalian lingkungan; Kepabeanan; dan/atau keimigrasian.
2. Fungsi pengusaha yaitu fungsi untuk melaksanakan pengusaha berupa penyediaan dan/atau pelayanan jasa kapal perikanan dan jasa terkait di pelabuhan perikanan yang meliputi : Pelayanan tambat dan labuh kapal perikanan; Pelayanan bongkar muat ikan; Pelayanan pengolahan hasil perikanan; Pemasaran dan distribusi ikan; Pemanfaatan fasilitas dan lahan di pelabuhan perikanan; Pelayanan perbaikan dan pemeliharaan kapal perikanan; Pelayanan logistik dan perbekalan kapal perikanan; Wisata bahari; dan/atau Penyediaan dan/atau pelayanan jasa lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam penyelenggaraan fungsi tersebut, dengan memperhatikan kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), maka pelaksanaan tugas dan fungsi yang menjadi tanggungjawab masing-masing eselon-I lingkup KKP yang berkaitan dengan kebijakan di daerah secara implisit juga menjadi tugas dan fungsi pelabuhan perikanan.

D. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Pengembangan sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 66/PERMEN-KP/2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perikanan Tangkap. Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan merupakan Eselon III meliputi posisi jabatan sebagai berikut:

1. Tim Kerja Dukungan Manajerial yang dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan rencana dan pelaksanaan program dan anggaran, hukum, organisasi, ketatalaksanaan, administrasi kepegawaian, keuangan dan umum, pelaksanaan pengendalian lingkungan (kebersihan, keamanan, ketertiban, keindahan dan keselamatan kerja), rumah tangga dan Barang Milik Negara, pelayanan masyarakat perikanan, melakukan penyiapan pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan.
2. Tim Kerja Operasional Pelabuhan dipimpin oleh Ketua Tim Kerja Operasional Pelabuhan yang memiliki tugas dan fungsinya yaitu melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pengumpulan data, informasi, publikasi, inspeksi pembongkaran ikan, bimbingan teknis, dan penerbitan Sertifikat CPIB.
3. Tim Kerja Kesyahbandaran, dipimpin oleh Ketua Tim Kerja Kesyahbandaran mempunyai tugas dan fungsinya melakukan pelaksanaan pengaturan keberangkatan, kedatangan dan keberadaan kapal perikanan, pelayanan penerbitan Surat Tanda Bukti Lapor, pemeriksaan *Log Book*, penerbitan Surat Persetujuan Berlayar, penerbitan Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan, pengawasan pengisian bahan bakar, bimbingan teknis serta kegiatan kesyahbandaran lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.
4. Tim Kerja Tata Kelola dan Pelayanan Usaha, yang dipimpin oleh Ketua Tim Kerja Tata Kelola dan Pelayanan Usaha mempunyai tugas dan fungsinya yaitu melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pembangunan, pengembangan, pemeliharaan, pengawasan, pengendalian, pendayagunaan sarana dan prasarana; bimbingan teknis; serta fasilitasi penyuluhan, pengawasan dan pengendalian sumber daya ikan, perkarantinaan ikan, publikasi hasil penelitian, pemantauan wilayah pesisir, wisata bahari, pembinaan mutu, pengolahan, dan pemasaran, serta distribusi hasil perikanan, melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pelayanan jasa seperti sewa alat berat, sewa lahan, jasa kebersihan, pas harian/berlangganan, penerbitan rekomendasi pemanfaatan lahan, dan fasilitas usaha, serta bimbingan teknis pelayanan usaha.
5. Kelompok Jabatan Fungsional, Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Pelabuhan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan operasional kepelabuhanan serta kegiatan lain yang sesuai dengan tugas masing-masing jabatan fungsional berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jabatan Fungsional pada Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambangan

terdiri dari Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Ahli Muda, Pranata Komputer Muda, dan Pranata Keuangan APBN Penyelia.



Gambar 2. Struktur Organisasi Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan

E. SDM Aparatur PPN Pengembangan

Berdasarkan UU No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah, diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian, disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan, serta digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pegawai ASN terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) yaitu warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan dan memiliki nomor induk pegawai secara nasional. Sedangkan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yaitu warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan kebutuhan instansi pemerintah untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.

Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan didukung oleh 69 orang pegawai yang terdiri dari PNS sebanyak 33 orang, PPPK sebanyak 18 orang dan Pramubakti sebanyak 18 orang berasal dari berbagai bidang keahlian. Seluruh SDM di pelabuhan perikanan ini merupakan aset untuk mendukung pencapaian visi, misi,

tujuan dan sasaran strategis Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan yang telah ditetapkan.

Tabel 1. Komposisi Pegawai Pelabuhan Tahun 2024 Berdasarkan Golongan

No	Jabatan	Golongan				Jumlah
		I	II	III	IV	
1.	Kepala Pelabuhan	-	-	-	1	1
2.	Tim Kerja Dukungan Manajerial	-	-	1	-	1
	JFT/Pelaksana Dukungan Manajerial	-	2	7	-	9
3.	Tim Kerja Tata Kelola dan Pelayanan Usaha	-	-	1	-	1
	JFT/Pelaksana Tim Kerja Tata Kelola dan Pelayanan Usaha	-	2	-	-	2
4.	Tim Kerja Operasional Pelabuhan	-	-	1	-	1
	JFT/Pelaksana Tim Kerja Operasional Pelabuhan	-	-	6	-	6
5.	Tim Kerja Kesyahbandaran	-	-	1	-	1
	JFT/Pelaksana Tim Kerja Kesyahbandaran	-	1	3	-	4
6.	Jabatan Fungsional Tertentu					
	Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Ahli (Muda)	-	-	4	-	4
	Pranata Komputer (Muda)	-	-	1	-	1
	Perencana (Muda)	-	-	1	-	1
	Pranata Keuangan APBN (Penyelia)	-	-	1	-	1
7.	Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	-	-	-	-	18
8.	Pegawai Pramubakti	-	-	-	-	18
Jumlah						69

Tabel 2. Komposisi Pegawai Pelabuhan Tahun 2024 Berdasarkan Pendidikan

No	Jabatan	Pendidikan				Jumlah
		SMA	DIII	S1/DIV	S2	
1.	Kepala Pelabuhan	-	-	-	1	1
2.	Tim Kerja Dukungan Manajerial	-	-	1	-	1
	JFT/Pelaksana Tim Kerja Dukungan Manajerial	1	2	6	-	9

3.	Tim Kerja Tata Kelola dan Pelayanan Usaha	-	-	1	-	1
	JFT/Pelaksana Tim Kerja Tata Kelola dan Pelayanan Usaha	2	-	-	-	2
4.	Tim Kerja Operasional Pelabuhan	-	-	-	1	1
	JFT/Pelaksana Tim Kerja Operasional Pelabuhan	-	2	4	-	6
5.	Tim Kerja Kesyahbandaran	-	-	1	-	1
	JFT/Pelaksana Tim Kerja Kesyahbandaran	-	1	3	-	4
6.	Jabatan Fungsional Tertentu					
	Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Ahli (Muda)	-	-	4	-	4
	Pranata Komputer (Muda)	-	-	-	1	1
	Perencana (Muda)	-	-	1	-	1
	Pranata Keuangan APBN (Penyelia)	-	-	1	-	1
7.	Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	8	3	7	-	18
8.	Pegawai Pramubakti	13	1	4		18
Jumlah						69

Tabel 3. Rekapitulasi Pegawai Pelabuhan Tahun 2024 Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jabatan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1.	Kepala Pelabuhan	1	-	1
2.	Tim Kerja Dukungan Manajerial	1	-	1
	JFT/Pelaksana Tim Kerja Dukungan Manajerial	2	7	9
3.	Tim Kerja Tata Kelola dan Pelayanan Usaha	-	1	1
	JFT/Pelaksana Tim Kerja Tata Kelola dan Pelayanan Usaha	2	-	2
4.	Tim Kerja Kerja Operasional Pelabuhan	1	-	1
	JFT/Pelaksana Tim Kerja Operasional Pelabuhan	4	2	6
5.	Tim Kerja Kerja Kesyahbandaran	1	-	1
	JFT/Pelaksana Tim Kerja Kesyahbandaran	3	1	4

	Kesyahbandaran			
	Jabatan Fungsional Tertentu			
6.	Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Ahli (Muda)	1	3	4
	Pranata Komputer (Muda)	1	-	1
	Perencana (Muda)	1	-	1
	Pranata Keuangan APBN (Penyelia)	-	1	1
	Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	11	7	18
8.	Pegawai Pramubakti	11	7	18
Jumlah				69

F. Sistematika Penyajian

Laporan Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambangan Tahun 2024 mengacu kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja ini bertujuan menginformasikan capaian kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambangan Tahun 2024. Capaian Kinerja (*Performance Results*) s/d Tahun 2024 tersebut dibandingkan dengan Target Tahunan Perjanjian Kinerja (*Performance Plan*) Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambangan Tahun 2023 sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan organisasi. Adapun kaitan dari sistematika penyajian Laporan Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambangan Tahun 2024 sebagai berikut:

1. RINGKASAN EKSEKUTIF

Pada Bab ini disajikan ringkasan secara menyeluruh Laporan Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambangan.

2. BAB I PENDAHULUAN

Pada Bab ini di sajikan informasi umum tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi serta Sistematika Laporan.

3. BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada Bab ini, menguraikan secara singkat mengenai visi, misi dan ringkasan perjanjian kinerja Tahun 202.

4. BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pada Bab ini, menguraikan capaian kinerja organisasi (membandingkan antara

target dan realisasi tahun ini, membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu, membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam perencanaan strategis organisasi, Analisa penyebab kegagalan/keberhasilan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan) serta realisasi anggaran.

5. BAB IV PENUTUP

Pada bagian ini dikemukakan kesimpulan secara umum tentang capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerja.

6. LAMPIRAN

Isi dari pada lampiran merupakan kumpulan dari Perjanjian Kinerja yang telah ditandatangani oleh Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambengan dan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Pembangunan Nasional Visi Presiden

- **Visi Presiden**

Visi didasarkan pada visi Indonesia 2045 yaitu mewujudkan Indonesia sebagai negara yang berdaulat, adil dan makmur. Visi pembangunan nasional 2021-2024 akan menggunakan Visi Presiden yaitu "Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkeperibadian, berlandaskan Gotong Royong". Visi ini diartikan dimana saat Indonesia telah sungguh-sungguh berdaulat, mandiri, dan berkeperibadian yang diwujudkan dengan kerja gotong royong, maka saat itulah Indonesia telah menjadi Indonesia maju sesuai dengan cita-cita kemerdekaan yang tertuang pada pembukaan UUD 1945.

- **Misi Presiden**

Misi Presiden diwujudkan melalui 9 (sembilan) Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua, yaitu sebagai berikut:

Misi 1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia

- Mengembangkan Sistem Jaringan Gizi dan Tumbuh Kembang Anak
- Mengembangkan Reformasi Sistem Kesehatan
- Mengembangkan Reformasi Sistem Pendidikan
- Revitalisasi Pendidikan dan Pelatihan Vokasi
- Menumbuhkan Kewirausahaan
- Memperkuat Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

Misi 2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing

- Memantapkan Penyelenggaraan Sistem Ekonomi Nasional yang Berlandaskan Pancasila
- Meningkatkan nilai tambah dari pemanfaatan infrastruktur
- Melanjutkan Revitalisasi Industri dan Infrastruktur Pendukungnya untuk Menyongsong Revolusi Industri 4.0
- Mengembangkan Sektor-Sektor Ekonomi Baru
- Mempertajam Reformasi Struktural dan Fiskal
- Mengembangkan Reformasi Ketenagakerjaan

Misi 3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan

- Redistribusi Aset Demi Pembangunan Berkeadilan
- Mengembangkan Produktivitas dan Daya Saing UMKM Koperasi

- Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan
- Mengembangkan Reformasi Sistem Jaminan Perlindungan Sosial
- Melanjutkan Pemanfaatan Dana Desa untuk Pengurangan Kemiskinan dan Kesenjangan Di pedesaan
- Mempercepat Penguatan Ekonomi Keluarga
- Mengembangkan Potensi Ekonomi Daerah Untuk Pemerataan Pembangunan Antar Wilayah

Misi 4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan

- Pengembangan Kebijakan Tata Ruang Terintegrasi
- Mitigasi Perubahan Iklim
- Penegakan Hukum dan Rehabilitasi Lingkungan Hidup

Misi 5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa

- Pembinaan Ideologi Pancasila
- Revitalisasi Revolusi Mental
- Restorasi Toleransi dan Kerukunan Sosial
- Mengembangkan Pemajuan Seni-Budaya
- Meningkatkan Kepeloporan Pemuda dalam Pemajuan Kebudayaan
- Mengembangkan Olahraga untuk Tumbuhkan Budaya Sportifitas dan Berprestasi

Misi 6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya

- Melanjutkan Penataan Regulasi
- Melanjutkan Reformasi Sistem dan Proses Penegakan Hukum
- Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
- Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan HAM
- Mengembangkan Budaya Sadar Hukum

Misi 7. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh

Warga

- Melanjutkan Haluan Politik Luar Negeri yang Bebas Aktif
- Melanjutkan Transformasi Sistem Pertahanan yang Modern dan TNI yang Profesional
- Melanjutkan Reformasi Keamanan dan Intelijen Yang Profesional dan Terpercaya

Misi 8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Terpercaya

- Aktualisasi Demokrasi Pancasila
- Mengembangkan Aparatur Sipil Negara yang Profesional
- Reformasi Sistem Perencanaan, Penganggaran dan Akuntabilitas Birokrasi
- Reformasi Kelembagaan Birokrasi Yang Efektif dan Efisien
- Percepatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
- Reformasi Pelayanan Publik

Misi 9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan

- Menata Hubungan Pusat Dan Daerah Yang Lebih Sinergi
- Meningkatkan Kapasitas Daerah Otonom dan Daerah Khusus/Daerah Istimewa dalam Pelayanan Publik dan Peningkatan Daya Saing Daerah
- Mengembangkan Kerjasama Antar Daerah Otonom dalam Peningkatan Pelayanan Publik dan Membangun Sentra-Sentra Ekonomi Baru

- **Tujuan Pembangunan Nasional**

Tujuan pembangunan nasional adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

B. Pembangunan Kelautan dan Perikanan Visi Kementerian Kelautan dan Perikanan

Visi KKP 2021-2024 adalah “Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan” untuk mewujudkan “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkeperibadian, berlandaskan Gotong Royong”.

- **Misi Kementerian Kelautan dan Perikanan**

Mengacu pada tugas, fungsi dan wewenang yang telah dimandatkan dalam peraturan perundang-undangan kepada KKP dan untuk melaksanakan Misi Presiden dalam RPJMN 2021-2024, KKP menjalankan 4 (empat) dari 9 (sembilan) Misi Presiden yaitu:

Misi 1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia

- Peningkatan Daya Saing SDM KP

- Pengembangan Inovasi dan Riset Kelautan dan Perikanan

Misi 2. Struktur Ekonomi Yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing

- Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap Perekonomian Nasional

Misi 3. Mencapai Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan

- Peningkatan Kelestarian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.

Misi 4. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya

- Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di KKP.

- **Tujuan Pembangunan Kelautan dan Perikanan**

Menjabarkan misi Kementerian Kelautan dan Perikanan, maka tujuan pembangunan kelautan dan perikanan adalah :

- 1. Peningkatan Daya Saing SDM KP dan Pengembangan Inovasi dan Riset Kelautan dan Perikanan, yakni:**
 - a. Mengembangkan kapasitas dan kompetensi SDM kelautan dan Perikanan
 - b. Mengembangkan inovasi dan riset kelautan dan perikanan
- 2. Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap Perekonomian Nasional, yakni:**
 - a. Mengoptimalkan pengelolaan sumberdaya perikanan budidaya dan perikanan tangkap
 - b. Meningkatkan mutu, daya saing dan sistem logistik hasil kelautan dan perikanan
- 3. Peningkatan Kelestarian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, yakni:**
 - a. Mengoptimalkan pengelolaan ruang laut, konservasi dan keanekaragaman hayati,
 - b. Meningkatkan pengawasan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan
 - c. Mengembangkan sistem perkarantina ikan, pengendalian mutu, keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan.
- 4. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di KKP, yakni:**
 - a. Meningkatkan kinerja Reformasi Birokrasi KKP

C. Pembangunan Perikanan Tangkap

- **Visi Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap**

Visi Ditjen Perikanan Tangkap tahun 2021-2024 adalah “Terwujudnya Perikanan Tangkap yang Maju dan Berkelanjutan serta Masyarakat Perikanan Tangkap yang Mandiri dan Sejahtera” untuk mewujudkan “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkeperibadian berlandaskan Gotong- Royong”.

- **Misi Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap**

Ditjen Perikanan Tangkap melaksanakan 4 (empat) Misi Presiden, dengan uraian sebagai berikut:

Misi 1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia

- Penumbuhan Kewirausahaan Masyarakat Perikanan Tangkap
- Penguatan Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Masyarakat Perikanan Tangkap Perempuan

Misi 2. Struktur Ekonomi Yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing

- Peningkatan Nilai Tambah dari Pemanfaatan Infrastruktur Perikanan Tangkap
- Melanjutkan Revitalisasi Industri Perikanan Tangkap dan Infrastruktur Pendukungnya untuk Menyongsong Revolusi Industri 4.0

Misi 3. Mencapai Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan

- Mitigasi Perubahan Iklim terhadap Ekosistem Sumber Daya Perikanan
- Penegakan Hukum dan Rehabilitasi Lingkungan Hidup Sumberdaya Perikanan

Misi 4. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya

- Reformasi Birokrasi Ditjen Perikanan Tangkap

- **Tujuan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap**

Menjabarkan misi Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, maka tujuan pembangunan perikanan tangkap adalah :

1. Meningkatkan Kualitas SDM Masyarakat Perikanan Tangkap

yaitu peningkatan pemahaman, kapasitas, serta inisiatif inovasi masyarakat perikanan tangkap; dilakukan melalui pendampingan/fasilitasi usaha, diversifikasi usaha, pemberdayaan/perlindungan masyarakat perikanan tangkap, serta pengarusutamaan gender.

2. Membangun Struktur Ekonomi Perikanan Tangkap Yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing

yaitu pembangunan struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing pada sub bidang perikanan tangkap, melalui pengelolaan sumber daya perikanan berbasis industrialisasi; peningkatan produktivitas sarana prasarana penangkapan, peningkatan kualitas ikan hasil tangkapan, serta implementasi keterpaduan sistem logistik ikan di pelabuhan perikanan.

3. Mencapai Lingkungan Hidup Sumberdaya Perikanan Yang Berkelanjutan

yaitu peningkatan kualitas lingkungan hidup pada sub bidang perikanan tangkap yang mencakup pengelolaan perikanan berbasis Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP); penerapan harvest strategy, alokasi izin usaha berbasis alokasi sumber daya ikan, penggunaan sarana prasarana penangkapan ramah lingkungan, serta implementasi konsep eco-infrastructure

4. Mewujudkan Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya di Lingkup Ditjen Perikanan Tangkap

yaitu upaya untuk mewujudkan reformasi birokrasi DJPT yang berkualitas, mencakup penataan kerangka kebijakan, profesionalisme ASN, keterbukaan perencanaan dan akuntabilitas pengelolaan keuangan serta pelayanan publik melalui implementasi komunikasi berbasis sistem informasi 4.0.

Berdasarkan visi dan misi Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap diturunkan ke Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambangan sebagai berikut:

1. Sebagai “Sentra Usaha Mina” artinya bahwa Wilayah PPN Pengambangan Jembrana merupakan sentral bagi kegiatan-kegiatan perikanan dari 5 (lima) TPI (Tempat Pendaratan Ikan) yang ada di Kota Jembrana sepanjang garis pantai 76 km, yang akhirnya akan menjadi Infrastruktur dari Industri Perikanan di masa mendatang.
2. “Yang Berdaya Saing” artinya Hasil Produksi/Tangkapan PPN Pengambangan mempunyai daya mutu yang berkualitas ekspor dikarenakan sangat menjaga nilai mutu sehingga Produk Perikanan yang dipasarkan stabil. Pada Tahun 2014 Indonesia sudah mencapai tingkat kesuksesan yang mencakup kawasan Pelabuhan tidak hanya sebagai Tempat Pendaratan Ikan, tetapi juga meliputi Penangkapan Ikan, Pelelangan, Pengolahan dan Pemasaran Ikan. Di dalam kawasan Pelabuhan Perikanan ke depannya diharapkan adanya industri/perusahaan yang bergerak dalam penyediaan sarana produksi perikanan yang berwawasan pengolahan sumberdaya ikan yang berkelanjutan di mana dalam pengelolaan

sumberdaya ikan yang berkelanjutan dalam pemanfaatan sumberdaya perikanan harus memperhatikan dampak akibat dari pemanfaatan yang berlebihan sehingga ikan tidak punah.

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi tersebut, diperlukan langkah – langkah sebagai berikut:

1. Dengan pelayanan prima diharapkan para masyarakat /nelayan /stakeholder menerima kemudahan segala kebutuhannya yang sesuai dengan pelayanan yang disediakan di PPN Pengambangan Jembrana
2. Pelabuhan sebagai kluster perikanan sekaligus pusat pertumbuhan industri perikanan terpadu hal ini dimaksudkan untuk memudahkan para nelayan-nelayan kecil membuka pasar ekonomi dimana akan terjadi transaksi secara menyeluruh dalam satu lokasi yaitu dialokasikan pada PPN Pengambangan Jembrana
3. Peningkatan produksi yang diikuti dengan peningkatan mutu, hal ini dimaksudkan dengan peningkatan yang tinggi harus diusahakan nilai produksi yang tinggi pula, contohnya dengan peningkatan mutu ikan yang dihasilkan harus, sehat, segar, dan bebas formalin. Maka di Pelabuhanlah yang akan menyediakan wadah untuk menguji sample ikan yang sudah bebas dari formalin. Setelah bebas dari formalin maka ikan tersebut boleh dipasarkan.
4. Pelabuhan perikanan sebagai Pusat Informasi dan Data Statistik Perikanan, diharapkan kedepannya PPN Pengambangan Jembrana adalah wakil dari seluruh Tempat Pendaratan Ikan/Tempat Pelelangan Ikan yang semua itu adalah wadah penghasil jumlah data dan statistik volume ikan yang di tangkap perhari, per bulan maupun pertahunnya di Kota Jembrana
5. Menciptakan lingkungan pelabuhan perikanan yang bersih higienis, adalah tolak ukur dari mutu ikan yang akan dipasarkan di daerah tangkapan oleh karena itu baik cara ataupun tindakan pemeliharaan fasilitas-fasilitas pelabuhan yang bersih sangat diperhatikan.
6. Pelabuhan perikanan sebagai fasilitator dalam pengembangan wisata bahari, hal ini dikembangkan sebagai wadah Pendidikan bagi Pelajar untuk mengenalkan Bahwa Laut adalah salah satu kekayaan Indonesia yang indah dan tidak akan pernah habis, oleh karena itu dengan wadah Wisata Bahari di harapkan membangkitkan para generasi muda untuk lebih mencintai laut baik Flora maupun Fauna Laut yang ada di Ekosistem laut
7. Meningkatkan multiplier effect bagi masyarakat Kota Jembrana melalui

peningkatan penyerapan tenaga kerja, diharapkan dengan Pemusatan Kegiatan di Sektor Perikanan maka diharapkan dapat menyerap tenaga kerja di kota Jember sendiri. Hal ini juga diharapkan dengan penambahan tenaga kerja yang bekerja di area PPN Pengembangan Jember maka akan mengurangi tingkat kejahatan dengan peningkatan taraf hidup seseorang dari menganggur menjadi pekerja.

8. Pelabuhan perikanan sebagai tempat pemantauan dan pengawasan (monitoring dan control) sumber daya ikan, tahap akhir dari semua itu diharapkan Pelabuhan Perikanan adalah media untuk mengontrol dan memonitoring baik para Nelayan/Stakeholder yang ada di Kota Jember untuk menjaga dan mengontrol Kebutuhan Usahanya di Bidang Perikanan dalam hal Penangkapan Ikan yang Berlebih karena hal ini sudah termasuk merusak Ekosistem Laut sehingga Sumberdaya Ikan yang ada lambat laun akan habis dan tidak ada lagi, sehingga akan terjadi kepincangan/ ketidakseimbangan Ekosistem Darat dan laut.

Sasaran Strategis Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan

Sasaran program pembangunan perikanan tangkap Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan yang merupakan Unit Pelaksana Teknis dari Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap adalah kondisi yang ingin dicapai oleh Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan sebagai suatu outcome/impact dari beberapa program yang dilaksanakan, antara lain:

1. Nilai PNBP Sektor Perikanan Tangkap Meningkat di PPN Pengembangan
 - a) Penerimaan PNBP Non SDA di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan (Rp Juta)
 - Jumlah pemenuhan pelaporan PNBP di UPT PPN Pengembangan (dokumen).
2. Produktivitas Perikanan Tangkap di PPN Pengembangan
 - a) Volume Produksi Perikanan Tangkap di PPN Pengembangan (Ton)
 - Validasi nilai perikanan tangkap di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan (dokumen)
3. Pengelolaan PPN Pengembangan yang berdaya saing
 - a) Persentase permohonan perusahaan yang dianalisa dan/atau dievaluasi di PPN Pengembangan (Persen)
 - Jumlah permohonan perusahaan yang dianalisa dan/atau dievaluasi di PPN Pengembangan (dokumen)

- b) Tingkat Kinerja PPN Pengembangan (Nilai)
 - Nilai Tingkat kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan berdasarkan data Evkin (Aplikasi)
- c) Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan (Persen)
 - Jumlah pelayanan kesyahbandaran yang diterbitkan PPN Pengembangan (dokumen)
- 4. Pengembangan dan peningkatan fasilitas PPN Pengembangan yang optimal
 - a) Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan (Persen)
 - Penjumlahan pengembangan fasilitas di PPN Pengembangan
 - b) Nilai Pengendalian Lingkungan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan (Nilai)
 - Nilai pengendalian lingkungan Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan berdasarkan data Selaraskan (Aplikasi)
- 5. Pengelolaan kapal perikanan dan alat penangkapan ikan yang berdaya saing di PPN Pengembangan
 - a) Kapal Perikanan izin daerah yang memenuhi ketentuan (Kapal)
 - Jumlah dokumen kapal perikanan yang diterbitkan oleh PPN Pengembangan
- 6. Pengelolaan Awak Kapal Perikanan yang Tersertifikasi/Terlindungi di PPN Pengembangan
 - a) Persentase Peningkatan Pengetahuan Kompetensi dan Perlindungan Nelayan/Awak Kapal Perikanan (Persen)
 - Data nelayan/awak kapal perikanan yang telah menerima pelatihan sertifikasi awak kapal (Dokumen)
- 7. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Di Lingkungan Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan
 - a) Nilai Pembangunan Zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan (Nilai)
 - Nilai Capaian Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK Area Manajemen Perubahan
 - Nilai Capaian Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK Area Penataan Tata Laksana
 - Nilai Capaian Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK Area Penataan Sistem Manajemen SDM
 - Nilai Capaian Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK Area Penguatan

Akuntabilitas

- Nilai Capaian Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK Area Penguatan Pengawasan
 - Nilai Capaian Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK Area Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
 - Nilai Capaian Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK Komponen Hasil
- b) Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja PPN Pengambengan (Persen)
- Nilai persentase atas penyelesaian laporan keuangan yang ditampilkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas LK PPN Pengambengan
- c) Nilai Rekonsiliasi Kinerja (Nilai)
- Nilai Perencanaan Strategik, Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja dan Pelaporan Kinerja dari Unit Kerja.
- d) IP ASN PPN Pengambengan (indeks)
- IP ASN Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambengan
- e) Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Satker PPN Pengambengan (Persen)
- Nilai dari beberapa unsur berikut :
 - Rencana umum pengadaan telah di upload ke dalam aplikasi SIRUP (20%);
 - Persentase jumlah pengadaan belanja modal yang dilaksanakan melalui SPSE (30%);
 - Laporan penyelenggaraan Barang/Jasa Kesesuaian tahap pelaksanaan (30%)
- f) Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN PPN Pengambengan (Persen)
- Nilai dari kegiatan yang dilakukan secara baik dan profesional dalam pengelolaan semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah
- g) Nilai IKPA PPN Pengambengan (Nilai)
- Realisasi Anggaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambengan
- h) Nilai Kinerja Anggaran PPN Pengambengan (Nilai)
- Realisasi anggaran UPT Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambengan (%)
- i) Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambengan
- Nilai survey dari masyarakat melalui Si Susun KKP (Aplikasi)

Informasi *cascading* Indikator Kinerja Utama (IKU) Level I kepada bawahan (Level II), seperti pada tabel dibawah ini :

Tabel 4. Tabel Informasi Cascading / Turunan Indikator Kinerja Utama (IKU) Level I kepada bawahan (Level II)

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Frekuensi	Perhitungan	Satuan	Target
1	Nilai PNBPN Sektor Perikanan Tangkap Meningkatkan di PPN Pengembangan	Penerimaan PNBPN Non SDA di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan (Rp Juta)	Triwulan	Nilai Posisi Akhir	Juta	760,971
2	Produktivitas perikanan tangkap di PPN Pengembangan meningkat	Volume produksi perikanan tangkap di PPN Pengembangan (Ton)	Triwulan	Nilai Posisi Akhir	Ton	14479
3	Pengelolaan PPN yang berdaya saing	3 Persentase permohonan perusahaan yang dianalisa dan/atau dievaluasi di PPN Pengembangan (Persen)	Tahunan	Nilai Posisi Akhir	Persen	100
		4 Tingkat Kinerja PPN Pengembangan (Nilai)	Triwulan	Rata-rata	Nilai	84
		5 Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan (Persen)	Tahunan	Nilai Posisi Akhir	Persen	84
4	Pengembangan dan peningkatan fasilitas PPN Pengembangan yang optimal	6 Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan (Persen)	Tahunan	Nilai Posisi Akhir	Persen	10,31
		7 Nilai Pengendalian Lingkungan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan (Nilai)	Triwulan	Nilai Posisi Akhir	Nilai	30,10
5	Pengelolaan kapal perikanan dan alat penangkapan ikan yang berdaya saing di PPN Pengembangan	Kapal Perikanan izin daerah yang memenuhi ketentuan (Kapal)	Triwulan	Nilai Posisi Akhir	Kapal	1043
6	Pengelolaan Awak Kapal Perikanan yang Tersertifikasi/Terlindungi di PPN Pengembangan	Persentase Peningkatan Pengetahuan Kompetensi dan Perlindungan Nelayan/Awak Kapal Perikanan (Persen)	Tahunan	Nilai Posisi Akhir	Persen	25
7	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Lingkungan	Nilai Pembangunan Zona integritas menuju	Tahunan	Nilai Posisi Akhir	Nilai	45,10

PPN Pengambengan		Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambengan (Nilai)				
	11	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambengan (Persen)	Triwulan	Nilai Posisi Akhir	Persen	80
	12	Nilai Rekonsiliasi kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambengan (Nilai)	Tahunan	Nilai Posisi Akhir	Nilai	94
	13	Indeks Profesionalitas ASN di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambengan (Indeks)	Semester	Nilai Posisi Akhir	Indeks	94
	14	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambengan (Persen)	Tahunan	Nilai Posisi Akhir	Persen	80
	15	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambengan (Persen)	Tahunan	Nilai Posisi Akhir	Persen	80
	16	Nilai IKPA Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambengan (Nilai)	Semester	Nilai Posisi Akhir	Nilai	93,76
	17	Nilai Kinerja Anggaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambengan (Nilai)	Tahunan	Nilai Posisi Akhir	Nilai	86
	18	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambengan (Indeks)	Triwulan	Nilai Posisi Akhir	Indeks	88,30

D. Target Kinerja dan Anggaran Triwulan I Tahun 2024

Penetapan kinerja pada Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambengan adalah dokumen perjanjian kinerja yang berisikan penugasan dari Direktur Jenderal Perikanan Tangkap kepada Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambengan

untuk melaksanakan program dan kegiatan pengembangan dan pengelolaan perikanan tangkap yang disertai dengan indikator kinerja Utama (IKU).

IKU merupakan tolak ukur pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan, berikut ini adalah IKU UPT Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan yang di *cascading* dari Dirjen Perikanan Tangkap kepada Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan sebagai berikut :

Tabel 5. Target Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Nilai PNBPN Sektor Perikanan Tangkap Meningkatkan di PPN Pengembangan	1 Penerimaan PNBPN Non SDA di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan (Rp Juta)	760,971
2	Produktivitas perikanan tangkap di PPN Pengembangan meningkat	2 Volume produksi perikanan tangkap di PPN Pengembangan (Ton)	14479
3	Pengelolaan PPN Pengembangan yang berdaya saing	3 Persentase permohonan perusahaan yang dianalisa dan/atau dievaluasi di PPN Pengembangan (Persen)	100
		4 Tingkat Kinerja PPN Pengembangan (Nilai)	84
		5 Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan (Persen)	84
4	Pengembangan dan peningkatan fasilitas PPN Pengembangan yang optimal	6 Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan (Persen)	10,31
		7 Nilai Pengendalian Lingkungan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan (Nilai)	30,1
5	Pengelolaan kapal perikanan dan alat penangkapan ikan yang berdaya saing di PPN Pengembangan	8 Kapal Perikanan izin daerah yang memenuhi ketentuan (Kapal)	1043
6	Pengelolaan Awak Kapal Perikanan yang Tersertifikasi/Terlindungi di PPN Pengembangan	9 Persentase Peningkatan Pengetahuan Kompetensi dan Perlindungan Nelayan/Awak Kapal Perikanan (Persen)	25
7	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Lingkungan PPN Pengembangan	10 Nilai Pembangunan Zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan (Nilai)	45,10
		11 Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan (Persen)	80
		12 Nilai Rekonsiliasi kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan (Nilai)	94
		13 Indeks Profesionalitas ASN di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan (Indeks)	84
		14 Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan (Persen)	80
		15 Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan (Persen)	80
		16 Nilai IKPA Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan (Nilai)	93,76
		17 Nilai Kinerja Anggaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan (Nilai)	86

	18	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan (Indeks)	88,30
--	----	--	-------

Adapun pagu anggaran yang terdapat pada DIPA Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan untuk Tahun 2023 dapat di komposisikan pada tabel di bawah ini

Tabel 6. Komposisi Target dan Realisasi Pagu Anggaran Berdasarkan Jenis Kegiatan Tahun 2024

KODE AKUN	URAIAN	PAGU	TARGET TW 1		REALISASI TW 1		
			TARGET	% PAGU	REALISASI	% TARGET	% PAGU
032.03.HB	Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	3.517.716.000	398.349.000	11,32%	306.245.707	76,88%	8,71%
2337	Pengelolaan Kapal Perikanan, Alat Penangkapan Ikan dan Pengawakan Kapal Perikanan	38.000.000	25.000.000	65,79%	17.471.953	69,89%	45,98%
2337.ACA	Perizinan Produk[Base Line]	25.000.000	25.000.000	100,00%	17.471.953	69,89%	69,89%
2337.ACA.001	Dokumen kapal perikanan yang diterbitkan	25.000.000	25.000.000	100,00%	17.471.953	69,89%	69,89%
2337.BDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat[Base Line]	13.000.000	0	0,00%	0		0,00%
2337.BDC.001	Nelayan/awak kapal perikanan yang ditingkatkan pengetahuannya/kompetensinya di bidang sarana penangkapan ikan	13.000.000	0	0,00%	0		0,00%
2338	Pengelolaan Pelabuhan Perikanan	3.388.402.000	372.549.000	10,99%	288.773.754	77,51%	8,52%
2338.ABR	Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan[Base Line]	150.000.000	0	0,00%	2.700.000		1,80%
2338.ABR.001	Rekomendasi kebijakan/perencanaan pembangunan/pengembangan pelabuhan perikanan yang disusun	150.000.000	0	0,00%	2.700.000		1,80%
2338.BGA	Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Ekonomi[Base Line]	1.750.402.000	269.948.000	15,42%	204.773.426	75,86%	11,70%
2338.BGA.002	Pelabuhan perikanan UPT Pusat dan Perintis yang dikelola dan operasional sesuai standar	1.750.402.000	269.948.000	15,42%	204.773.426	75,86%	11,70%
2338.RAL	Sarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan[Base Line]	75.000.000	61.500.000	82,00%	54.100.000	87,97%	72,13%
2338.RAL.001	Sarana penunjang pemungutan PNPB Perikanan Tangkap yang disediakan	75.000.000	61.500.000	82,00%	54.100.000	87,97%	72,13%
2338.RBQ	Prasarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan[Base Line]	1.413.000.000	41.101.000	2,91%	27.200.328	66,18%	1,93%
2338.RBQ.001	Pelabuhan perikanan UPT Pusat dan PP Perintis yang ditingkatkan fasilitasnya untuk mendukung Penangkapan Ikan Terukur	1.000.000.000	27.001.000	2,70%	27.200.328	100,74%	2,72%
2338.RBQ.003	Pelabuhan Perikanan yang terintegrasi dan bertaraf internasional yang dikembangkan - IFP IFM I	413.000.000	14.100.000	3,41%	0	0,00%	0,00%
2339	Pengelolaan Perizinan dan Kenelayanan	8.000.000	800.000	10,00%	0	0,00%	0,00%
2339.QDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat[Base Line]	8.000.000	800.000	10,00%	0	0,00%	0,00%

2339.QDC.003	Nelayan yang difasilitasi akses pendanaan usahanya	8.000.000	800.000	10,00%	0	0,00%	0,00%
2341	Pengelolaan Sumber Daya Ikan	83.314.000	0	0,00%	0		0,00%
2341.QKB	Pemantauan produk[Base Line]	83.314.000	0	0,00%	0		0,00%
2341.QKB.001	Laporan data logbook penangkapan Ikan yang dikumpulkan dan diverifikasi	83.314.000	0	0,00%	0		0,00%
032.03.WA	Program Dukungan Manajemen	11.576.879.000	2.911.301.576	25,15%	2.762.351.030	94,88%	23,86%
2342	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Perikanan Tangkap	11.576.879.000	2.911.301.576	25,15%	2.762.351.030	94,88%	23,86%
2342.CAN	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi[Base Line]	168.856.000	57.834.000	34,25%	55.650.000	96,22%	32,96%
2342.CAN.955	Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	168.856.000	57.834.000	34,25%	55.650.000	96,22%	32,96%
2342.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal[Base Line]	10.953.376.000	2.790.747.576	25,48%	2.626.097.556	94,10%	23,98%
2342.EBA.960	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	34.000.000	0	0,00%	0		0,00%
2342.EBA.963	Layanan Data dan Informasi	18.000.000	0	0,00%	1.230.000		6,83%
2342.EBA.994	Layanan Perkantoran	10.901.376.000	2.790.747.576	25,60%	2.624.867.556	94,06%	24,08%
2342.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal[Base Line]	160.507.000	0	0,00%	36.234.660		22,58%
2342.EBB.951	Layanan Sarana Internal	160.507.000	0	0,00%	36.234.660		22,58%
2342.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal[Base Line]	55.000.000	27.980.000	50,87%	4.126.000	14,75%	7,50%
2342.EBC.954	Layanan Manajemen SDM	55.000.000	27.980.000	50,87%	4.126.000	14,75%	7,50%
2342.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal[Base Line]	239.140.000	34.740.000	14,53%	40.242.814	115,84%	16,83%
2342.EBD.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	60.000.000	0	0,00%	0		0,00%
2342.EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	39.000.000	11.420.000	29,28%	14.019.258	122,76%	35,95%
2342.EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan	140.140.000	23.320.000	16,64%	26.223.556	112,45%	18,71%
		15.094.595.000	3.309.650.576	21,93%	3.068.596.737	92,72%	20,33%

E. Rencana Aksi Penetapan Kinerja

Rencana aksi penetapan kinerja merupakan penjabaran lebih lanjut dari target – target yang telah disusun dan ditetapkan pada dokumen RKAKL. Dokumen rencana aksi digunakan sebagai alat monitor secara berkala (triwulanan) terhadap pencapaian indikator output kinerja dan anggaran. Rencana aksi disusun hanya untuk menjabarkan IKU ***Perspektif Internal Process dan Learning and Growth*** yang disandingkan dengan indikator kegiatan pada pencapaian Form DA setiap bulannya sehingga di dapat persentase pencapaian secara berkala. Sebagaimana pada tabel perbandingan capaian IKU dan Anggaran di bawah ini, sebagai berikut ini:

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan tahun 2019 telah melaksanakan penilaian indikator kinerja utama sebanyak 13 (Tiga belas) dengan mengacu pada *Balanced Scorecard* (BSC). Pada tahun 2024, terdapat 7 (tujuh) sasaran strategis dengan rincian 9 (Sembilan) Indikator Kinerja Utama dan 9 (Sembilan) Indikator Kinerja Tambahan. Dari perhitungan angka realisasi terhadap indikator kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan Triwulan I Tahun 2024 Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) menurut *Balanced Scorecard* (BSC) sebesar **115,75%** dengan rincian pada Table berikut.

Tabel 7. Matriks Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Triwulan I Tahun 2024

Kode	Sasaran/Indikator Kinerja	Satuan	Polarisasi	Perhitungan	Target	Target	Capaian	%
					2024	s/d MARET	s/d MARET	
S.01	Nilai PNBP Sektor Perikanan Tangkap Meningkat di PPN Pengembangan						120	
IKS.1	Penerimaan PNBP Non SDA di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan (Rp Juta) Data Dukung1	Juta	Maximize	Nilai Posisi Akhir	760,97	190	369,23	120
S.02	Produktivitas Perikanan Tangkap di PPN Pengembangan Meningkat						120	
IKS.02.1	Volume produksi perikanan tangkap di PPN Pengembangan (Ton) Data Dukung1	Ton	Maximize	Nilai Posisi Akhir	14.479,00	2.000,00	7.651,00	120
S.03	Pengelolaan PPN Pengembangan yang Berdaya Saing						110,24	
IKS.03.1	Persentase permohonan perusahaan yang dianalisa dan/atau dievaluasi di PPN Pengembangan (Persen)	Persen	Maximize	Nilai Posisi Akhir	100	0	0	
IKS.03.2	Tingkat Kinerja PPN Pengembangan (Nilai) Data Dukung1	Nilai	Maximize	Rata-rata	84	84	92,6	110,24
IKS.03.3	Tingkat Pelayanan Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan (Persen)	Persen	Maximize	Nilai Posisi Akhir	84	0	0	
S.04	Pengembangan dan Peningkatan Fasilitas PPN Pengembangan yang Optimal						120	
IKS.04.1	Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan (Persen)	Persen	Maximize	Nilai Posisi Akhir	10,31	0	0	
IKS.04.2	Nilai Pengendalian Lingkungan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan (Nilai) Data Dukung1	Nilai	Maximize	Rata-rata	30,1	30,1	93	120
S.05	Pengelolaan Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan yang Berdaya Saing di PPN Pengembangan						111,15	

		Kapal Perikanan izin daerah yang memenuhi ketentuan (Kapal)								
IKS.05.1	Data Dukung1		Kapal	Maximize	Nilai Posisi Akhir	1.043,00	1.013,00	1.126,00	111,15	
S.06	Pengelolaan Awak Kapal Perikanan yang Tersertifikasi/Terlindungi di PPN Pengambengan									
IKS.06.1		Persentase Peningkatan Pengetahuan Kompetensi dan Perlindungan Nelayan/Awak Kapal Perikanan (Persen)	persen	Maximize	Nilai Posisi Akhir	25	0	0		
S.07	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Lingkungan PPN Pengambengan									113,08
IKS.07.1		Nilai Pembangunan Zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambengan (Nilai)	Nilai	Maximize	Nilai Posisi Akhir	45,1	0	0		
IKS.07.2	Data Dukung1	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambengan (Persen)	Persen	Maximize	Nilai Posisi Akhir	80	80	100	120	
IKS.07.3		Nilai Rekonsiliasi kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambengan (Nilai)	Nilai	Maximize	Nilai Posisi Akhir	94	0	0		
IKS.07.4		Indeks Profesionalitas ASN di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambengan	Indeks	Maximize	Nilai Posisi Akhir	84	0	0		
IKS.07.5		Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambengan (Persen)	Persen	Maximize	Nilai Posisi Akhir	80	0	0		
IKS.07.6		Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambengan (Persen)	Persen	Maximize	Nilai Posisi Akhir	80	0	0		
IKS.07.7		Nilai IKPA Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambengan	Nilai	Maximize	Nilai Posisi Akhir	93,76	0	0		
IKS.07.8		Nilai Kinerja Anggaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambengan (Nilai)	Nilai	Maximize	Nilai Posisi Akhir	86	0	0		
IKS.07.9	Data Dukung1	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambengan (Indeks)	Indeks	Maximize	Nilai Posisi Akhir	88,3	88,3	93,73	106,15	

Dalam keberhasilan pelaksanaan pembangunan perikanan tangkap melalui evaluasi kinerja Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambangan Tahun 2024 diukur melalui 18 indikator kinerja. Adapun pembahasan masing-masing indikator kinerja utama (IKU) akan dicantumkan pada sub bab berikut sesuai dengan ketentuan yang tercantum pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 sebagai berikut :

Sasaran Strategis 1

Nilai PNBP Sektor Perikanan Tangkap Meningkat di PPN Pengambangan

IKU 1 – Penerimaan PNBP Non SDA di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambangan (Rp Juta)

Indikator Nilai PNBP PPN Pengambangan adalah seluruh penerimaan PPN Pengambangan yang merupakan pelaksanaan dari fungsi perusahaan PPN Pengambangan sebagai Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) PPN Pengambangan didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2015 yang diperbaharui dengan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Peraturan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Nomor 4/PER-DJPT/2017 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pungutan Penerimaan Negara Bukan Pajak Di Luar Pungutan Perikanan di Pelabuhan Perikanan. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) PPN Pengambangan terdiri atas penerimaan umum dan penerimaan fungsional. Penerimaan umum berasal dari Pendapatan dari lelang Bangunan, Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin, Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran dan Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu. Sedangkan penerimaan fungsional merupakan pendapatan yang diperoleh Pelabuhan yang berasal dari pelayanan jasa yang ada di PPN Pengambangan. Kegiatan pelayanan jasa di PPN Pengambangan adalah sebagai berikut:

- Pelayanan Jasa Tambat Labuh;
- Pelayanan Jasa Air;
- Pelayanan Jasa *Cold Room dan Freezer*;
- Pelayanan Jasa Kendaraan (Truk Refrigerator, Dump Truk dll);
- Pelayanan Jasa Penggunaan Tanah dan/atau bangunan;

- Pelayanan Jasa Penumpukan Barang/Penjemuran jaring/ikan;
- Pelayanan Jasa Pas Masuk;
- Pelayanan Jasa Kebersihan Pelabuhan;
- Pelayanan Jasa Penggunaan Sarana dan Prasarana;
- Pelayanan Jasa Listrik;

Target indikator ini diukur dengan metode pengukuran triwulanan.

Tabel 8. Rincian Capaian Indikator

Sasaran Kegiatan – 1		Nilai PNBP Sektor Perikanan Tangkap Meningkat di PPN Pengambengan							
Indikator Kinerja – 1		Penerimaan PNBP Non SDA di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambengan (Rp Juta)							
Tahun 2023		Tahun 2024			% Capaian Terhadap		Renstra 2020-2024		
Target Triwulan I	Realisasi Triwulan I	Target Tahun 2024	Target Triwulan I	Realisasi Triwulan I	Realisasi Triwulan I 2023	Target Triwulan I 2024	Target 2022	% thd Target Renstra	Realisasi Target
-	-	760,97	190	369,23	-	194	350	105,49	

a. Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini

Indikator Penerimaan PNBP Non SDA di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambengan Triwulan I memiliki realisasi lebih besar dari target yang telah ditentukan. Target Triwulan I tahun 2024 yaitu 190 juta rupiah sedangkan realisasi sebesar 369,23 juta rupiah. Capaian Penerimaan PNBP Non SDA di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambengan berasal dari Penerimaan PNBP Non SDA di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambengan dan SKPT PP Teluk Awang (Pelabuhan Binaan PPN Pengambengan).

b. Target dan Realisasi Kinerja Tahun lalu

Berdasarkan data tersebut di atas, persentase realisasi Triwulan I Tahun 2024 tidak bisa dibandingkan dengan Triwulan I Tahun 2023, dikarenakan perhitungan IKU ini pada Tahun 2023 dilakukan secara tahunan.

c. Perbandingan realisasi indikator tahun 2024 terhadap Renstra

Berdasarkan data tersebut, indikator Penerimaan PNBPNon SDA di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambangan Triwulan I Tahun 2024 jika dibandingkan dengan target menengah dalam renstra (2022) mencapai 105,49%.

d. Membandingkan realisasi dengan Standar Nasional

Tabel 9. Perbandingan dengan Satker Lain

Capaian PPN Pengambangan	Capaian PPN Prigi	Persentase
369,23	344,57	107,15

Jika dibandingkan dengan capaian di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi, capaian di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambangan mencapai 107,15%. Hal ini disebabkan adanya penerimaan pada penggunaan tanah dan bangunan yang terjadi di triwulan I dan adanya penyerahan tanah dari provinsi Bali ke KKP sehingga kios-kios yang berada di tanah tersebut dikenakan tarif penggunaan tanah. Selain itu adanya peningkatan pada penggunaan cold storage menyebabkan meningkatnya PNBPN di triwulan I.

e. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

Adanya kenaikan pada penerimaan PNBPN seperti pada penerimaan jasa kebersihan, Pas masuk, jasa penggunaan tanah dan/atau bangunan, listrik, cold storage dan air. Jika dilihat dari penerimaan yang ada, kenaikan ini disebabkan oleh mulai meningkatnya aktivitas penangkapan ikan oleh nelayan sehingga berpengaruh pada pelayanan jasa yang diberikan. Selain itu karena adanya penyerahan tanah oleh Pemprov Bali ke KKP, sehingga menambah pelayanan penggunaan tanah. Sedangkan untuk jenis pelayanan jasa *cold storage* meningkat dari tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan adanya pengguna jasa yang menggunakan jasa *cold storage* PPN Pengambangan. Sedangkan pada penerimaan Pas masuk meningkat dari sebelumnya karena sudah mulai ada aktivitas penangkapan ikan, namun demikian dikarenakan belum adanya pagar kawasan pelabuhan sehingga akses masuk menuju pelabuhan tidak satu pintu/terdapat jalan tikus sehingga banyak yang lolos dari jasa Pas masuk. Kurangnya jumlah petugas pas masuk juga berpengaruh pada penerimaan Pas masuk. Dengan adanya pagar kawasan pelabuhan diharapkan dapat menjadi solusi dari keamanan dan peningkatan penerimaan PNBPN di PPN Pengambangan.

f. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tabel

Tabel 10. Realisasi anggaran mendukung IKU

IKU	Capaian	Alokasi Anggaran (RARO)	Realisasi Anggaran (RARO)	AARO x CRO	(AARO x CRO) RARO
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3)x(2)	(6)= (5)-(4)
Penerimaan PNBP Non SDA di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan	48,52%	161.817.000	36.311.400	78.515.069	42.203.669

Pada Triwulan I Tahun 2024, realisasi penyerapan anggaran untuk mendukung capaian indikator Penerimaan PNBP Non SDA di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan sebesar Rp 161.817.000,. Sedangkan efisiensi penggunaan anggaran sebesar 48,52%. SDM yang menunjang terlaksananya capaian Penerimaan PNBP Non SDA di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan adalah tim kerja Tata Kelola dan Pelayanan Usaha sehingga penggunaan SDM untuk kegiatan ini sudah efisien.

g. Analisis program / kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Perhitungan dari indikator ini diperoleh dari pencapaian Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang diperoleh dari Pelayanan jasa Tambat labuh, Pelayanan Kebersihan, Pelayanan jasa Pengadaan Air, Pelayanan Listrik, Pelayanan jasa Pengadaan Es, Pelayanan Pas Masuk, Pelayanan Penggunaan Tanah dan bangunan, Pelayanan jasa penggunaan kendaraan/dumptruck, Pelayanan Jasa Penggunaan *Cold Storage* di PPN Pengembangan.

Pendapatan PNBP ini dapat dilakukan dengan maksimal jika penjagaan di pintu masuk dapat dilakukan dengan baik, dengan didirikan pagar Kawasan. Namun jika tidak terdapat pagar Kawasan pengunjung dapat lewat melalui pintu masuk lainnya.

Sasaran Strategis 2

Produktivitas perikanan tangkap di PPN Pengembangan

IKU 2 – Volume produksi perikanan tangkap di PPN Pengembangan (Ton)

Indikator Kinerja Utama Produksi Perikanan Tangkap di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan merupakan hasil dari volume produksi yang didaratkan

perusahaan perikanan serta pelabuhan perikanan. Realisasi produksi perikanan tangkap PPN Pengambengan dilaporkan secara berkala setiap triwulan. Volume produksi Triwulan I Tahun 2024 adalah sebanyak 7.651 Ton atau 382% dari target Triwulan I Tahun 2024 sebesar 2.000 Ton. Realisasi produksi perikanan tangkap dilaporkan secara berkala setiap triwulan.

Tabel 11. Rincian Capaian Indikator

Sasaran Kegiatan – 2		Produktivitas perikanan tangkap di PPN Pengambengan							
Indikator Kinerja – 2		Volume produksi perikanan tangkap di PPN Pengambengan							
Tahun 2023		Tahun 2024			% Capaian Terhadap		Renstra 2020-2024		
Target Triwulan I	Realisasi Triwulan I	Target Tahun 2024	Target Triwulan I	Realisasi Triwulan I	Realisasi Triwulan I 2023	Target Triwulan I 2024	Target 2022	% thd Renstra	Realisasi Target
250	275,15	14.479	2.000	7.651	2780	382	13.200	57,96	

a. Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini

Indikator Volume produksi perikanan tangkap di PPN Pengambengan (Ton) memiliki realisasi lebih besar dari target yang telah ditentukan. Target Triwulan I tahun 2024 yaitu 2.000 ton sedangkan realisasi sebesar 7.651 ton. Target jumlah produksi perikanan tangkap di PPN Pengambengan dapat tercapai karena factor antara lain: Rata-rata kontribusi penangkapan di perairan umum memiliki pertumbuhan kontribusi yang positif. Hal ini menunjukkan bahwa potensi penangkapan di perairan umum cukup baik dan akan semakin berkontribusi terhadap total volume jika pengelolaan perikanan di perairan umum lebih di perhatikan (termasuk kelembagaan dan system pencatatan data hasil tangkapan). Produksi perikanan tangkap dominan di Pelabuhan adalah lemuru, tongkol, layang, dan tembang.

b. Target dan Realisasi Kinerja Tahun lalu

Berdasarkan data tersebut, realisasi Triwulan I Tahun 2024 lebih besar jika dibandingkan dengan realisasi Triwulan I Tahun 2023 sebesar 2780%. Realisasi Triwulan I Tahun 2024 sebesar 7.651 ton sedangkan realisasi Triwulan I Tahun 2023 sebesar 275,15 ton. Hal ini disebabkan cuaca yang baik pada awal tahun 2024

sehingga meningkatnya jumlah kapal bongkar dan hari kerja kapal selama Triwulan I Tahun 2024 dibandingkan dengan Triwulan I Tahun 2023.

c. Perbandingan realisasi indikator tahun 2024 terhadap Renstra

Berdasarkan data tersebut, indikator ini pada Triwulan I Tahun 2024 jika dibandingkan dengan target menengah dalam renstra (2022) mencapai 57,96%.

d. Membandingkan realisasi dengan Standar Nasional

Tabel 12. Perbandingan dengan Satker Lain

Capaian PPN Pengambengan	Capaian PPN Prigi	Persentase
7.651	2.520,95	303,49

Jika dibandingkan dengan capaian di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi, capaian di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambengan mencapai 303,49 %. Hal ini disebabkan karena tingginya usaha armada perikanan tangkap pada PPN Pengambengan yang melakukan penangkapan ikan dan cuaca yang baik pada Selat Bali.

e. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

Jumlah produksi perikanan tangkap merupakan jumlah produksi perikanan tangkap yang berasal dari laut dan produksi perikanan tangkap yang berasal dari perairan pedalaman yang didaratkan di PPN Pengambengan. Jumlah Produksi Perikanan Tangkap merupakan hasil perhitungan gabungan dari volume produksi yang didaratkan perusahaan perikanan, pelabuhan perikanan dan hasil estimasi di desa sampel yakni desa perikanan yang terpilih sebagai desa untuk dilakukan kegiatan pengumpulan/pendataan statistik perikanan tangkap, dipilih secara metodologi melalui kerangka survei. Realisasi jumlah produksi perikanan tangkap UPT Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambengan diukur dan dilaporkan secara berkala setiap bulan. Indikator ini dapat memenuhi target jumlah produksi apabila jumlah tangkapan melebihi target di tahun 2023. Jika dibandingkan Jumlah Produksi Perikanan Tangkap pada Triwulan I Tahun 2023, maka volume produksi pada tahun 2024 Triwulan I mengalami kenaikan. Hal ini disebabkan pada Triwulan I tahun 2024 cuaca sangat baik dan kondisi perairan yang mendukung untuk dilakukan

penangkapan ikan serta jumlah kapal yang melakukan bongkar muat ikan mengalami peningkatan.

f. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tabel

Tabel 13. Realisasi anggaran mendukung IKU

IKU	Capaian	Alokasi Anggaran (RARO)	Realisasi Anggaran (RARO)	AARO x CRO	(AARO x CRO) RARO
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3)x(2)	(6)= (5)-(4)
Volume produksi perikanan tangkap di PPN Pengambengan	52,84%	420.204.000	16.347.697	222.044.396	205.696.699

Pada Triwulan I Tahun 2024, realisasi penyerapan anggaran untuk mendukung capaian indikator Volume produksi perikanan tangkap di PPN Pengambengan sebesar Rp 420.204.000,- Sedangkan efisiensi penggunaan anggaran sebesar 52,84%. SDM yang menunjang terlaksananya capaian Volume produksi perikanan tangkap di PPN Pengambengan adalah tim kerja Operasional Pelabuhan dan Operator PIPP sehingga penggunaan SDM untuk kegiatan ini sudah efisien.

g. Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Jumlah Produksi Perikanan Tangkap di UPT Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambengan merupakan hasil perhitungan dari jumlah produksi perikanan tangkap yang berasal dari laut yang didaratkan di PPN Pengambengan. Jumlah produksi perikanan tangkap UPT PPN Pengambengan pada Triwulan I Tahun 2024 yaitu 7.651 ton mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan Triwulan I Tahun 2023 yang sebesar 275,15 ton.

Hal ini disebabkan pada Triwulan I Tahun 2024 cuaca sangat baik dan kondisi perairan yang mendukung untuk dilakukan penangkapan ikan sehingga jumlah frekuensi kapal yang melakukan bongkar meningkat yaitu 1.309 kapal jika dibandingkan dengan Triwulan I Tahun 2023 yang hanya berjumlah 287 kapal. Upaya – upaya yang dilakukan Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambengan dalam meningkatkan capaian indicator ini adalah dengan meningkatkan keahlian nelayan, Sosialisasi tentang Peta Prakiraan Daerah Penangkapan Ikan yang dapat diakses oleh nelayan setiap hari sebelum berangkat melaut. Pelaksanaan IKU

Jumlah Produksi Perikanan Tangkap PPN Pengambengan tahun 2024 ini di dukung oleh anggaran kegiatan penyiapan bahan koordinasi pengolahan, verifikasi, validasi dan analisis.

Sasaran Strategis 3

Pengelolaan PPN Pengambengan yang Berdaya Saing

IKU 03 - Persentase permohonan perusahaan yang dianalisa dan/atau dievaluasi di PPN Pengambengan (Persen)

Indikator Persentase permohonan perusahaan yang dianalisa dan/atau dievaluasi di PPN Pengambengan merupakan indikator baru yang ada di tahun 2023. Permohonan perusahaan dilakukan oleh pelaku usaha pada saat melakukan penggunaan tanah dan atau bangunan baik untuk permohonan baru maupun perpanjangan. Target indikator ini pada tahun 2023 sebesar 100 persen dengan periode pengukuran tahunan.

Kegiatan perusahaan di Pelabuhan perikanan merupakan salah satu tugas dan fungsi Pelabuhan sesuai dengan Permen kelautan dan perikanan nomor 8 Tahun 2012 tentang Kepelabuhanan Perikanan. Pada indikator kinerja ini kegiatan yang dilakukan terkait sosialisasi aplikasi SIJAKA dan SIPAUS, kegiatan Evaluasi Perusahaan, Rapat stake holder dan kegiatan lain yang menunjang perusahaan. Pada kegiatan ini tentunya tidak hanya keberhasilan dalam pencapaian realisasi anggaran saja yang dicapai namun output dari kegiatannya juga perlu diperhatikan. Melalui kegiatan-kegiatan yang dilakukan diharapkan pelaku usaha lebih memahami aturan yang telah ditetapkan terkait perusahaan sehingga pelaku usaha lebih tertib dalam berinvestasi di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambengan dan dapat berpengaruh pada peningkatan PNBPN. Target indikator ini sebesar 100 persen dengan metode pengukuran tahunan, sehingga pada triwulan ini belum dapat ditentukan capaiannya.

IKU 04 - Tingkat Kinerja PPN Pengambengan (Nilai)

Indikator ini merupakan nilai tingkat operasional Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambengan. Perhitungan indikator ini ditinjau dari evaluasi kinerja pelabuhan perikanan yang di nilai oleh eselon I (DJPT) meliputi operasional tambak labuh, pas masuk, workshop, *Coldstorage*, *Ice Crusher Machine*, *Docking/Slipway*, pemakaian peralatan TPI, penyaluran air ke kapal, penyaluran air bersih, penyaluran

es, penyaluran BBM, jumlah tenaga kerja, data frekuensi kunjungan kapal, jumlah kapal yang diinspeksi, jumlah kapal hasil pengujian formalin, jumlah kapal yang mendaratkan ikan yang diterbitkan setiap bulan oleh Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambangan. Tingkat Operasional Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambangan meliputi : operasional tambat labuh, pas masuk, workshop, cold storage, ice crusher machine, pemakaian peralatan TPI, penyaluran air bersih, es, jumlah tenaga kerja, data frekuensi kunjungan kapal, jumlah kapal yang di inspeksi, dan jumlah kapal hasil pengujian formalin.

Tingkat Operasional Pelabuhan Perikanan merupakan indikator yang menunjukkan prosentase pencapaian kegiatan operasional pelabuhan perikanan.

Tabel 14. Rincian Capaian Indikator

Sasaran Kegiatan – 3		Pengelolaan PPN Pengambangan yang Berdaya Saing							
Indikator Kinerja – 4		Tingkat Kinerja PPN Pengambangan (Nilai)							
Tahun 2023		Tahun 2024			% Capaian Terhadap		Renstra 2020-2024		
Target Triwulan I	Realisasi Triwulan I	Target Tahun 2024	Target Triwulan I	Realisasi Triwulan I	Realisasi Triwulan I 2023	Target Triwulan I 2024	Target 2022	% thd Renstra	Realisasi Target
80	87,50	84	84	92,6	109	110	82	121,95	

a. Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini

Indikator tingkat *Kinerja* Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambangan memiliki realisasi lebih besar dari target yang telah ditentukan. Target Tahun 2024 yaitu dengan nilai 84 sedangkan realisasi sebesar 92,6 atau sebesar 110 persen.

b. Target dan Realisasi Kinerja Tahun lalu

Berdasarkan data tersebut, realisasi tahun 2024 lebih besar jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 sebesar 102,4 %. Realisasi tahun 2024 sebesar 92,6 sedangkan realisasi tahun 2023 sebesar 84. Hal ini disebabkan karena beberapa faktor yaitu tingginya frekuensi pengiriman data produksi, jumlah kedatangan kapal perikanan, terlaksananya beberapa pelaksanaan sosialisasi dan bimbingan teknis, serta capaian PNBPN.

c. Perbandingan realisasi indikator tahun 2024 terhadap Renstra

Berdasarkan data tersebut, indikator ini pada Triwulan I Tahun 2024 jika dibandingkan dengan target menengah dalam renstra (2022) mencapai 121,95%.

d. Membandingkan realisasi dengan Standar Nasional

Tabel 15. Perbandingan dengan Satker Lain

Capaian PPN Pengambangan	Capaian PPN Prigi	Persentase
92,6	93,83	98,68

Jika dibandingkan dengan capaian di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi, capaian di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambangan mencapai 98,68%. Hal ini disebabkan karena beberapa faktor yaitu capaian penerbitan STBLKK dan SPB pada aplikasi Teman SPB yang kurang dari 50 persen, selain itu juga kurangnya daya tampung pada kolam pelabuhan yang disebabkan adanya pendangkalan di kolam pelabuhan.

e. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

Dapat dilihat dari nilai EVKIN Tahun 2024 yaitu 92,6. Nilai ini didukung oleh kegiatan Penyediaan Data Perikanan Tangkap, Tingkat Pelayanan Usaha Pengguna Jasa yang terstandarisasi, Persentase Pemenuhan Fasilitas Sarana dan Prasarana. Ditambah lagi dengan adanya ketersediaan SDM pengelola pelabuhan dan penyerapan tenaga kerja di kawasan pelabuhan perikanan, serta jumlah investor yang terdapat di pelabuhan perikanan. Kemudian didukung juga dengan pemasukan PNBPN yang terdapat di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambangan.

f. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tabel

Tabel 16. Realisasi anggaran untuk mendukung IKU

IKU	Capaian	Alokasi Anggaran (RARO)	Realisasi Anggaran (RARO)	AARO x CRO	(AARO x CRO) RARO
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3)x(2)	(6)= (5)-(4)
Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran Pelabuhan	110,24%	215.700.000	11.026.300	237.783.571	226.757.271

Perikanan Nusantara Pengembangan					
--	--	--	--	--	--

Pada Triwulan I Tahun 2024, realisasi penyerapan anggaran untuk mendukung capaian indikator Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan sebesar Rp 226.757.271,- Sedangkan efisiensi penggunaan anggaran sebesar 110,24%. SDM yang menunjang terlaksananya capaian Tingkat Kinerja PPN Pengembangan adalah penanggung jawab masing-masing kriteria pada masing-masing tim kerja dan operator PIPP sehingga penggunaan SDM untuk kegiatan ini sudah efisien.

g. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang kinerja

Perhitungan dari indikator ini adalah Rata – rata dari Capaian kegiatan yang mendukung operasional pelabuhan perikanan. Pengukuran indikator ini dilakukan sepanjang tahun kegiatan dan dilaporkan hasilnya setiap bulannya. Beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan dalam mendukung operasional pelabuhan yaitu dilaksanakan sosialisasi dan bimbingan teknis terkait penanganan ikan yang baik kepada nelayan. Tidak hanya itu, kegiatan lain yang telah dilaksanakan yaitu sinkronisasi data produksi perikanan tangkap yang didaratkan di PPN Pengembangan dengan instansi terkait.

IKU 05 - Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan (Persen)

Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Dalam hal ini *Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran* adalah kegiatan pelayanan public atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan kesyahbandaran seperti Permohonan Persetujuan Berlayar, Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan dan Surat Tanda Bukti Laport Kedatangan Kapal dll terkait operasional kapal perikanan di pelabuhan perikanan yang diajukan oleh pengguna jasa di pelabuhan. Target indikator ini pada tahun 2024 sebesar 84 persen dengan periode pengukuran tahunan sehingga belum dapat diukur capaiannya pada triwulan ini.

Sasaran Strategis 4***Pengembangan dan peningkatan fasilitas PPN Pengembangan yang optimal******IKU-06 - Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan (Persen)***

Pengendalian pengembangan fasilitas merupakan indikator terkait fasilitas pada Pelabuhan yang tersedia dibandingkan fasilitas yang ada pada master plan. Dalam Masterplan PPN pengembangan Tahun 2009 terdapat 44 fasilitas yang tersedia namun di PPN Pengembangan saat ini eksisting fasilitas sebanyak 31 fasilitas. Target indikator ini pada tahun 2023 sebesar 10,31 persen dengan periode pengukuran tahunan, sehingga belum dapat diukur capaiannya pada triwulan ini.

IKU 07 - Nilai Pengendalian Lingkungan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan (Nilai)

Indikator *Nilai Pengendalian Lingkungan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan* merupakan indikator baru yang ada di tahun 2023. Pengendalian Lingkungan merupakan indikator yang memuat kegiatan yang dilakukan dalam menjaga kondisi lingkungan yang sesuai dengan standar. Kegiatan ini juga di pantau melalui aplikasi SELARASKAN (Sistem Pelaporan Ragam Informasi Lingkungan Pelabuhan Perikanan). Target indikator ini pada Triwulan I Tahun 2024 sebesar 30,01 persen dengan periode pengukuran triwulanan.

Tabel 17. Rincian Capaian Indikator

Sasaran Kegiatan – 4		<i>Pengembangan dan peningkatan fasilitas PPN Pengembangan yang optimal</i>						
Indikator Kinerja – 7		Nilai Pengendalian Lingkungan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan (Nilai)						
Tahun 2023		Tahun 2024			% Capaian Terhadap		Renstra 2020-2024	
Target Triwulan I	Realisasi Triwulan I	Target Tahun 2024	Target Triwulan I	Realisasi Triwulan I	Realisasi Triwulan I 2023	Target Triwulan I 2024	Target 2024	% Realisasi thd Target Renstra
-	-	30,1	30,1	93	-	308	-	-

a. Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini

Indikator *Nilai Pengendalian Lingkungan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan* memiliki realisasi lebih besar dari target yang telah ditentukan. Target tahun 2023 sebesar 30,01 dan realisasi tahun 2023 sebesar 79,07. *Nilai Pengendalian Lingkungan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan* dapat tercapai karena Kerjasama dari Tim Kerja sehingga kegiatan yang harus dilakukan sesuai dengan aplikasi pada SELARASKAN dapat dilakukan sehingga mendapatkan nilai yang semaksimal mungkin.

b. Target dan Realisasi Kinerja Tahun lalu

Berdasarkan data tersebut di atas, persentase realisasi Triwulan I Tahun 2024 tidak bisa dibandingkan dengan Triwulan I Tahun 2023, dikarenakan perhitungan IKU ini pada Tahun 2023 dilakukan secara tahunan.

c. Perbandingan realisasi indikator tahun 2024 terhadap Renstra

Berdasarkan data tersebut, indikator ini pada Triwulan I Tahun 2024 tidak dapat dibandingkan dengan target menengah dalam renstra (2022)

d. Membandingkan realisasi dengan Standar Nasional

Tabel 18. Perbandingan dengan Satker Lain

Capaian PPN Pengembangan	Capaian PPN Prigi	Persentase
93	90,22	103,08

Jika dibandingkan dengan capaian di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi, capaian di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan mencapai 103,08%. Hal ini disebabkan karena data adanya kerjasama tim sehingga dapat mencapai nilai yang maksimal.

e. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

Pada IKU Nilai Pengendalian Lingkungan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan sudah tercapai sangat baik dengan persentase 308%, keberhasilan ini dukungan dan komitmen Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan memenuhi penilaian yang dipersyaratkan pada aplikasi SELARASKAN. Dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan capaian ini perlu adanya sosialisasi pihak-pihak terkait data dukung untuk penilaian.

f. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tabel

Tabel 19. Realisasi anggaran mendukung IKU

IKU	Capaian	Alokasi Anggaran (RARO)	Realisasi Anggaran (RARO)	AARO x CRO	(AARO x CRO) RARO
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3)x(2)	(6)= (5)-(4)
Nilai Pengendalian Lingkungan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan	308,97%	24.800.000	2.948.000	76.624.585	73.676.585

Pada Triwulan I Tahun 2024, realisasi penyerapan anggaran untuk mendukung capaian indikator Nilai Pengendalian Lingkungan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan sebesar Rp 73.676.585,- Sedangkan efisiensi penggunaan anggaran sebesar 308,97%. SDM yang menunjang terlaksananya

capaian Nilai Pengendalian Lingkungan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan adalah Tim Kerja Tata Kelola dan Pelayanan Usaha dan Operator Selaraskan sehingga penggunaan SDM untuk kegiatan ini sudah efisien.

g. Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Salah satu kegiatan yang dilakukan dalam pencapaian IKU ini yakni kegiatan terkait uji kualitas air dan udara yang dilakukan setiap semester. Dengan adanya ketersediaan anggaran untuk uji kualitas ini diharapkan nilai dari Selaraskan dapat lebih maksimal. Adapun Uji yang dilakukan melalui Laboratorium BPISDKP. Selain uji kualitas air yang dilakukan, kegiatan lain yang menunjang seperti kegiatan kebersihan, pemeliharaan, hemat energi juga dapat menunjang penilaian dalam selaraskan. Sehingga perlu adanya Kerjasama dalam Tim Kerja Pelabuhan dalam pencapaian indikator tersebut.

Sasaran Strategis 5

Pengelolaan kapal perikanan dan alat penangkapan ikan yang berdaya saing di PPN Pengembangan

IKU-08 Kapal Perikanan izin daerah yang memenuhi ketentuan (Kapal)

Kapal Perikanan izin daerah yang memenuhi ketentuan merupakan Indikator laporan atas hasil pelaksanaan perijinan terhadap kapal perikanan yang terdaftar di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan, antara lain Sertifikat Kelayakan Kapal Perikanan (SKKP). Sertifikat Kelayakan Kapal Perikanan atau disingkat adalah surat kapal yang menyatakan bahwa Kapal Perikanan memenuhi aspek kelaiklautan, kelaiktangkapan untuk keselamatan pelayaran. PPN Pengembangan sebagai Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal PerikananTangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan melayani pengurusan SKPP. Target indicator ini pada Triwulan I tahun 2024 sebesar 1013 kapal dengan periode pengukuran triwulanan.

Tabel 20. Rincian Capaian Indikator

Sasaran Kegiatan – 5		Pengelolaan kapal perikanan dan alat penangkapan ikan yang berdaya saing di PPN Pengambengan						
Indikator Kinerja – 8		Kapal Perikanan izin daerah yang memenuhi ketentuan (Kapal)						
Tahun 2023		Tahun 2024			% Capaian Terhadap		Renstra 2020-2024	
Target Triwulan I	Realisasi Triwulan I	Target Tahun 2024	Target Triwulan I	Realisasi Triwulan I	Realisasi Triwulan I 2023	Target Triwulan I 2024	Target 2024	% Realisasi thd Target Renstra
-	-	1043	1013	1126	-	111	-	-

a. Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini

Indikator Kapal Perikanan izin daerah yang memenuhi ketentuan memiliki realisasi yang lebih tinggi dari target yang telah ditentukan. Target *Triwulan I* 2024 sebesar 1013 dokumen dan realisasi sebesar 1126 dokumen. Tingkat Kapal Perikanan izin daerah yang memenuhi ketentuan dapat tercapai karena factor antara lain :

1. Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambengan melakukan pelayanan penerbitan Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan di 3 provinsi, yaitu Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;
2. Melaksanakan Sosialisasi di UPT Daerah terkait SKKP;
3. Bekerjasama dengan petugas daerah dalam rangka membantu proses perlengkapan dan pengajuan SKKP;
4. Bertambahnya petugas Pemeriksa Kelaikan Kapal Perikanan.

b. Target dan Realisasi Kinerja Tahun lalu

Berdasarkan data tersebut di atas, persentase realisasi Triwulan I Tahun 2024 tidak bisa dibandingkan dengan Triwulan I Tahun 2023, dikarenakan perhitungan IKU ini pada Tahun 2023 dilakukan secara tahunan.

c. Perbandingan realisasi indikator tahun 2024 terhadap Renstra

Berdasarkan data tersebut, indikator ini pada Triwulan I Tahun 2024 tidak dapat dibandingkan dengan target menengah dalam renstra (2022)

d. Membandingkan realisasi dengan Standar Nasional

Tabel 21. perbandingan dengan Satker Lain

Capaian PPN Pengambangan	Capaian PPN Prigi	Persentase
1126	360	312,77

Jika dibandingkan dengan capaian di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi, capaian di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambangan mencapai 312,77%. Hal ini disebabkan karena jangkauan daerah pelayanan penerbitan Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan yang dilakukan Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambangan lebih luas dibandingkan dengan Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi yang meliputi 3 provinsi, yaitu Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur.

e. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan merupakan salah satu upaya untuk memastikan bahwa kapal yang akan dipergunakan sebagai kapal perikanan dan sebelum diterbitkannya dokumen perizinan berusaha. Ketentuan di bidang pengeolaan perikanan yang harus dipenuhi suatu kapal perikanan berupa : (i) aspek laik tangkap, untuk melakukan pembatasan kapasitas tangkap dan selektivitas alat penangkapan ikan; dan (ii) aspek laik simpan, untuk menjamin kemampuan kapal perikanan dalam mempertahankan mutu hasil tangkapan ikan. Sedangkan ketentuan keselamatan direpresentasikan oleh aspek laik laut, untuk meningkatkan keselamatan kapal dan awak kapal perikanan. Penerbitan SKKP di PPN Pengambangan pada Triwulan I Tahun 2024 yaitu 1126 dokumen, dan telah mencapai target tahunan, target tahun 2024 sebesar 1043 dokumen. Jumlah dokumen terbit merupakan hasil dari pemeriksaan kelaikan kapal perikanan yang telah dilaksanakan oleh petugas kelaikan, mencakup Provinsi Bali, Nusa Tenggara Timur, dan Nusa Tenggara Barat. Tingginya pengajuan penerbitan SKKP yang mencakup ketiga provinsi tersebut merupakan salah satu faktor yang menunjang tercapainya target penerbitan SKKP Triwulan I Tahun 2024 dapat tercapai.

f. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tabel

Tabel 22. Realisasi anggaran mendukung IKU

IKU	Capaian	Alokasi Anggaran (RARO)	Realisasi Anggaran (RARO)	AARO x CRO	(AARO x CRO) RARO
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3)x(2)	(6)= (5)-(4)
Kapal Perikanan izin daerah yang memenuhi ketentuan	107,96%	24.900.000	17.471.953	26.881.496	9.409.543

Pada Triwulan I Tahun 2024, realisasi penyerapan anggaran untuk mendukung capaian indikator Kapal Perikanan izin daerah yang memenuhi ketentuan sebesar Rp 9.409.543,- Sedangkan efisiensi penggunaan anggaran sebesar 107,96%. SDM yang menunjang terlaksananya capaian Kapal Perikanan izin daerah yang memenuhi ketentuan adalah penanggung jawab masing-masing kriteria pada masing-masing tim dan operator SKKP sehingga penggunaan SDM untuk kegiatan ini sudah efisien.

g. Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Perhitungan indikator ini adalah rata-rata dari capaian kegiatan yang mendukung kesyahbandaran di pelabuhan perikanan. Pengukuran indikator ini dilakukan sepanjang tahun kegiatan dan dilaporkan hasilnya setiap bulannya. Beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan dalam mendukung IKU ini yaitu dilaksanakan sosialisasi terkait SKKP yang meliputi proses pengajuan maupun syarat yang harus dipenuhi baik dokumen kapal lainnya, dan perlengkapan keselamatan kapal yang harus dipenuhi saat proses pemeriksaan kelaikan kapal perikanan berlangsung.

Sasaran Strategis 6

Pengelolaan Awak Kapal Perikanan yang Tersertifikasi/Terlindungi di PPN Pengambengan

IKU-09 - Persentase Peningkatan Pengetahuan Kompetensi dan Perlindungan Nelayan/Awak Kapal Perikanan (Persen)

Menurut PP 27 tahun 2021 Bidang perikanan bahwa Awak Kapal Perikanan adalah orang yang bekerja atau dipekerjakan di atas Kapal Perikanan oleh pemilik atau operator Kapal Perikanan untuk melakukan tugas di atas Kapal Perikanan sesuai dengan jabatannya yang tercantum dalam buku siji. Dalam Tata Kelola Pengawasan Kapal Perikanan Paragraf 1 Persyaratan Kerja di Kapal Perikanan Pasal 141 bahwa Setiap Awak Kapal Perikanan yang akan bekerja harus memenuhi persyaratan:

- a. berumur paling sedikit 18 (delapan belas) tahun dan harus memiliki kartu identitas diri;
- b. memiliki buku pelaut Awak Kapal perikanan;
- c. memiliki Kompetensi;
- d. sehat jasmani dan rohani;
- e. terdaftar sebagai peserta jaminan
- f. memiliki PKL; dan
- g. disijil.

Perjanjian Kerja Laut yang selanjutnya disingkat PKL adalah kesepakatan tertulis antara awak Kapal Perikanan dengan pemilik Kapal Perikanan atau operator Kapal Perikanan atau Nakhoda atau agen awak Kapal Perikanan. Kemudian Sertifikat Keahlian Awak Kapal Perikanan adalah pengakuan terhadap keahlian untuk melakukan pekerjaan sebagai Awak Kapal Perikanan setelah lulus ujian kompetensi yang diselenggarakan oleh Dewan Penguji Keahlian Awak Kapal Perikanan untuk semua jenjang pendidikan dan pelatihan Awak Kapal Perikanan. Maka dari itu setiap awak kapal yang akan bekerja di kapal perikanan wajib melaksanakan pemenuhan awak kapal perikanan yang sesuai PP 27 Tahun 2021 tentang Bidang perikanan.

Persentase Peningkatan Pengetahuan Kompetensi dan Perlindungan Nelayan/Awak Kapal Perikanan merupakan indikator baru yang ada di tahun 2023. Persentase Peningkatan Pengetahuan Kompetensi dan Perlindungan Nelayan/Awak Kapal Perikanan merupakan syarat pemenuhan awak kapal yang bekerja di kapal

perikanan. Target indikator ini pada tahun 2023 sebesar 25 persen dengan periode pengukuran tahunan.

Sasaran Strategis 7

Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Lingkungan PPN Pengembangan

IKU- 10 Nilai Pembangunan Zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan (Nilai)

Pencapaian sasaran strategis ini diukur melalui 4 (empat) indikator yakni (1) Nilai Capaian Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan; (2) Indeks Profesionalitas ASN Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan; (3) Nilai PM SKIP Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan; (4) Nilai IKPA Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan. Pencapaian sasaran strategis ini diukur melalui 1 (satu) indikator yakni “*Nilai Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) PPN Pengembangan*” yang merupakan Hasil Penilaian Lembar Kerja Evaluasi (LKE) oleh Tim Penilai Internal (TPI)

Inspektorat Jenderal Bidang V Kementerian Kelautan dan Perikanan sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No 62/PERMEN-KP/2017 tentang Pedoman Pembangunan dan Penetapan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan tahapan yang dilakukan :

- a) Evaluasi Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM pada Unit kerja yang akandinilai;
- b) Pemantauan terhadap saran perbaikan dari hasil evaluasi;
- c) Penilaian terhadap dokumen yang disajikan berdasarkan Lembar Kerja Evaluasi (LKE)serta pengujian implementasi pembangunan zona integritas;
- d) Pleno penilaian oleh Tim Penilaian Internal (TPI) untuk menetapkan nilai akhir sebagai dasar memenuhi persyaratan untuk diusulkan mendapat predikat menuju WBK/WBBM;
- e) Pemantauan sebelum penilaian oleh Tim Penilai Nasional (TPN);
- f) Pendampingan saat penilaian oleh Tim Penilai Nasional (TPN).

Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) sebagaimana yang telah diatur oleh Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2019

tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 52 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK / WBBM) di Lingkungan Instansi Pemerintah. Komponen penilaian terdiri atas 2 (dua) komponen dengan beberapa area perubahan yakni sebagai berikut :

- (1) Komponen Proses/Pengungkit, mencakup 8 (delapan) area perubahan antara lain:
 - a. Manajemen Perubahan, dengan indikator penilaian: Tim Pembangunan ZI, Roadmap Pembangunan ZI, Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan ZI, Perubahan Pola Pikir dan budaya kinerja
 - b. Penataan Tata Laksana, dengan indikator penilaian : Proses bisnis dan SOP kegiatan utama, E-Government, Keterbukaan Informasi Publik
 - c. Penataan Sistem Manajemen Sumberdaya Manusia, dengan indikator penilaian : Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi, Proses penerimaan pegawai transparan, objektif, akuntabel dan bebas KKN, Pengembangan pegawai berbasis kompetensi, Promosi jabatan dilakukan secara terbuka, Penetapan kinerja individu, penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai, Pelaksanaan evaluasi jabatan, Sistem informasi Kepegawaian,
 - d. Penguatan Akuntabilitas, dengan indikator penilaian : Keterlibatan pimpinan, Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja,
 - e. Penguatan Pengawasan, dengan indikator penilaian : Gratifikasi, Penerapan SPIP, Pengaduan masyarakat, Whistle Blowing System, Penanganan Benturan Kepentingan dan Pembangunan Zona Integritas, APIP
 - f. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, dengan indikator penilaian : Standar pelayanan, Budaya pelayanan prima, Pengelolaan pengaduan dan Penilaian kepuasan terhadap pelayanan, Pemanfaatan teknologi Informasi
- (2) Komponen Hasil
 - a. Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN, dengan indikator penilaian : Nilai Persepsi Korupsi dan Opini BPK,
 - b. Kualitas Pelayanan Publik, dengan indikator penilaian : Nilai Persepsi Kualitas Pelayanan

Target indikator ini pada tahun 2024 sebesar 45,10 persen dengan periode pengukuran tahunan.

IKU- 11 Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan (Persen)

Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan mengacu pada jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal kepada Ditjen Perikanan Tangkap berdasarkan LHP (terbatas pada LHP Audit, Reviu dan Evaluasi baik bentuk surat maupun bab) yang terbit pada setiap triwulan yang telah ditindaklanjuti (berstatus proses dan/atau tuntas) oleh Ditjen Perikanan Tangkap yang menjadi objek pengawasan.

Target indikator ini pada tahun 2024 sebesar 80 persen dengan periode pengukuran triwulan.

Tabel 23 Rincian Capaian Indikator Pengendalian Pengembangan

Sasaran Kegiatan – 7		<i>Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Lingkungan PPN Pengembangan</i>						
Indikator Kinerja – 11		Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan (Persen)						
Tahun 2023		Tahun 2024			% Capaian Terhadap		Renstra 2020-2024	
Target Triwulan I	Realisasi Triwulan I	Target Tahun 2024	Target Triwulan I	Realisasi Triwulan I	Realisasi Triwulan I 2023	Target Triwulan I 2024	Target 2024	% Realisasi thd Target Renstra
75	100	80	80	100	100	125	-	-

a. Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini

Indikator Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan memiliki realisasi yang lebih tinggi dari target yang telah ditentukan sebesar 125 persen. Target Triwulan I Tahun 2024 sebesar 80 persen dan realisasi yaitu 100 persen.

b. Target dan Realisasi Kinerja Tahun lalu

Berdasarkan data tersebut, realisasi Triwulan I Tahun 2024 sama jika dibandingkan dengan realisasi Triwulan I Tahun 2023 sebesar 100%.

c. Perbandingan realisasi indikator tahun 2024 terhadap Renstra

Berdasarkan data tersebut, indikator ini pada Triwulan I Tahun 2024 tidak dapat dibandingkan dengan target menengah dalam renstra (2022)

d. Membandingkan realisasi dengan Standar Nasional

Tabel 24. Perbandingan dengan Satker Lain

Capaian PPN Pengambengan	Capaian PPN Prigi	Persentase
100	100	100

Jika dibandingkan dengan capaian di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi, capaian di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambengan mencapai 100%.

e. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

IKU ini dapat dilakukan apabila satker telah menindaklanjuti temuan yang telah dilakukan oleh ITJEN KKP dan melaksanakan saran yang telah diberikan. Aplikasi yang digunakan adalah Sidak KKP.

Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tabel

Tabel 25 Realisasi anggaran mendukung IKU

IKU	Capaian	Alokasi Anggaran (RARO)	Realisasi Anggaran (RARO)	AARO x CRO	(AARO x CRO) RARO
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3)x(2)	(6)= (5)-(4)
Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambangan	125,00%	105.500.000	26.223.556	131.875.000	105.651.444

Pada Triwulan I Tahun 2024, realisasi penyerapan anggaran untuk mendukung capaian indikator Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambangan sebesar Rp 105.651.444,- Sedangkan efisiensi penggunaan anggaran sebesar 125%. SDM yang menunjang terlaksananya capaian Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambangan adalah penanggung jawab masing-masing kriteria pada masing-masing tim dan operator Sidak sehingga penggunaan SDM untuk kegiatan ini sudah efisien.

f. Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Kegiatan ini berupa pelaksanaan pelaporan tindak lanjut terhadap temuan oleh ITJEN KKP di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambangan.

IKU - 12 Nilai Rekonsiliasi kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambangan (Nilai)

Rekonsiliasi kinerja Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap adalah Proses evaluasi cepat terhadap pelaksanaan pengelolaan kinerja di lingkup Ditjen Perikanan Tangkap. Rekonsiliasi kinerja dilakukan untuk Meningkatkan pemahaman para

pengelola kinerja di seluruh satuan kerja KKP, Menjadi sarana bersama untuk mengidentifikasi terhadap perubahan dan perkembangan pengelolaan kinerja dan Sebagai sarana pendampingan terhadap Eselon II DJPT untuk mengawal SAKIP menjadi lebih baik. Terdapat 4 aspek penilaian diantaranya adalah Aspek Kepatuhan (Bobot 25%), Aspek Kesesuaian (Bobot 25%), Aspek Ketercapaian (Bobot 30%), dan Aspek Ketepatan (20%). Pengukuran Indikator dilakukan secara tahunan. Target indikator ini pada tahun 2024 sebesar 94 dengan periode pengukuran tahunan.

IKU- 13 Indeks Profesionalitas ASN di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambangan (Indeks)

Profesionalitas adalah kualitas para anggota profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk melakukan tugas-tugasnya. Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan (Permen PAN dan RB No.38 Tahun 2018). Nilai Indeks Profesionalitas ASN merupakan gambaran kualitas profesional ASN KKP yang di ukur setiap tahun oleh Biro SDMA, Sekretariat Jenderal dengan mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB No. 38 Tahun 2018 tentang Peraturan Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara. Realisasi IKU ini diukur dan dilaporkan berkala setiap bulan untuk ASN di setiap Subkor di PPN Pengambangan. IKU ini didukung oleh anggaran penyusunan administrasi perencanaan dan pengembangan SDM aparatur.

Indikator kinerja IKU ini adalah adalah suatu instrument yang digunakan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat profesionalitas ASN yang hasilnya digunakan untuk penilaian dan evaluasi guna pengembangan profesionalitas profesi ASN. Target indikator ini pada tahun 2024 sebesar 45,10 persen dengan periode pengukuran tahunan.

IKU- 14 Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambangan (Persen)

Pengadaan barang/jasa pada hakikatnya adalah upaya pihak pengguna untuk mendapatkan atau mewujudkan barang/jasa yang dibutuhkannya, dengan menggunakan metode dan proses tertentu agar dicapai kesepakatan spesifikasi, harga, waktu, dan kesepakatan lainnya. Dalam proses pengadaan mengacu pada RUP (Rencana umum pengadaan) yang telah disusun.

Metode pengukuran Tingkat kepatuhan PBJ Unit Eselon I diukur berdasarkan jumlah nilai dari beberapa unsur berikut : 1. Rencana umum pengadaan telah di upload ke dalam aplikasi SIRUP (20%) 2) Persentase jumlah pengadaan belanja modal yang dilaksanakan melalui SPSE (30%) 3) Laporan penyelenggaraan Barang/Jasa 4) Kesesuaian tahap pelaksanaan (30%). Target indikator ini pada tahun 2024 sebesar 80 persen dengan periode pengukuran tahunan.

IKU- 15 Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambengan (Persen)

Pengelolaan BMN adalah kegiatan yang dilakukan secara baik dan profesional dalam pengelolaan semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Metode pengukuran dari indikator ini adalah Tingkat pemanfaatan rencana kebutuhan BMN (RKBMN) Tahun 2020 (10%) 2. Tersedianya usulan penetapan status penggunaan BMN untuk pengadaan belanja modal triwulan 4 tahun 2020 baik ke pengguna barang dan pengelola barang (25%) 3. Tingkat penyelesaian inventarisasi dan penilaian kembali (revaluasi aset) tahun 2017-2019 (20%) 4. Pemanfaatan BMN hasil pengadaan belanja modal tahun 2020 didukung Berita Acara Serah Terima (BAST)/Berita Acara Pemakaian (25%) 5. Penyusunan Laporan BMN (Semesteran dan Tahunan) secara tepat waktu (20%). Target indikator ini pada tahun 2024 sebesar 80 persen dengan periode pengukuran tahunan.

IKU- 16 Nilai IKPA Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambengan (Nilai)

Kinerja Pelaksanaan Anggaran adalah sebagai evaluasi dan spending review terhadap optimalisasi peran belanja Satker dalam rangka ketahanan fiskal dan ekonomi dengan berdasarkan 12 (dua belas) Indikator Pelaksanaan Anggaran yaitu Revisi DIPA, Halaman III DIPA, Pengelolaan UP, Rekon LPj Bendahara, Data Kontrak, Penyelesaian Tagihan, Penyerpan Anggaran, Retur SP2D, Perencanaan Kas, Pengembalian SPM, Dispensasi Penyampaian SPM, dan Pagu Minus

Pengukuran dan pelaporan indikator ini dilakukan setiap triwulannya dengan mengacu kepada realisasi keempat komponen yang dicantumkan pada **dashboard Om- SPAN Kementerian Keuangan**. Target indikator ini pada tahun 2024 sebesar 93,76 persen dengan periode pengukuran semesteran.

IKU-17 Nilai Kinerja Anggaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan (Nilai)

Nilai kinerja anggaran merupakan amanat dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 249 Tahun 2011 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Adapun aspek yang dinilai adalah aspek implementasi yang terdiri atas 4 (empat) komponen yakni

- (1) Penyerapan Anggaran (P) dengan bobot 9,7 persen
- (2) Konsistensi antara perencanaan dan implementasi (K) dengan bobot 18,2 persen,
- (3) Pencapaian keluaran (PK) dengan bobot 43,5 persen dan
- (4) Efisiensi (E) dengan bobot 28,6 persen. Adapun pengelompokan hasil penilaian adalah sebagai berikut :
 - a. Nilai Kinerja Anggaran > 90 persen 100 persen dikategorikan **Sangat Baik**;
 - b. Nilai Kinerja Anggaran > 80 persen 90 persen dikategorikan **Baik**;
 - c. Nilai Kinerja Anggaran > 60 persen 80 persen dikategorikan **Cukup** atau **Normal**;
 - d. Nilai Kinerja Anggaran > 50 persen 60 persen dikategorikan **Kurang**;
 - e. Nilai Kinerja Anggaran 50 persen dikategorikan **Sangat Kurang**;

Target indikator ini pada tahun 2024 sebesar 86 persen dengan periode pengukuran tahunan.

IKU-18 Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan (Indeks)

Indikator Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan merupakan indikator baru yang ada di tahun 2023. Salah satu upaya yang harus dilakukan dalam perbaikan pelayanan publik adalah dengan melakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) kepada pengguna layanan dengan mengukur kepuasan masyarakat pengguna layanan. Target indikator ini pada tahun 2024 sebesar 88,30 dengan periode pengukuran tahunan.

Tabel 26. Rincian Capaian Indikator

Sasaran Kegiatan – 7		Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Lingkungan PPN Pengambengan						
Indikator Kinerja – 18		Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambengan (Indeks)						
Tahun 2023		Tahun 2024			% Capaian Terhadap		Renstra 2020-2024	
Target Triwulan I	Realisasi Triwulan I	Target Tahun 2024	Target Triwulan I	Realisasi Triwulan I	Realisasi Triwulan I 2023	Target Triwulan I 2024	Target 2024	% thd Target Renstra
-	-	88,30	88,30	93,73	-	106	-	-

a. Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini

Indikator Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambengan memiliki realisasi yang lebih tinggi dari target yang telah ditentukan. Target Triwulan I Tahun 2024 sebesar 88,30 dan realisasi sebesar 93,73.

b. Target dan Realisasi Kinerja Tahun lalu

Berdasarkan data tersebut di atas, persentase realisasi Triwulan I Tahun 2024 tidak bisa dibandingkan dengan Triwulan I Tahun 2023, dikarenakan perhitungan IKU ini pada Tahun 2023 dilakukan secara tahunan.

c. Perbandingan realisasi indikator tahun 2024 terhadap Renstra

Berdasarkan data tersebut, indikator ini pada Triwulan I Tahun 2024 tidak dapat dibandingkan dengan target menengah dalam renstra (2022)

d. Membandingkan realisasi dengan Standar Nasional

Tabel 27 Perbandingan dengan Satker Lain

Capaian PPN Pengambengan	Capaian PPN Prigi	Persentase
93,73	90,26	103,84

Jika dibandingkan dengan capaian di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi, capaian di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambengan mencapai 103,84%.

e. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

Dalam melaksanakan survei kepuasan masyarakat terdapat unsur pelayanan yang digunakan sebagai acuan penilaian, yaitu (1) persyaratan, adalah syarat yang harus dipenuhi baik persyaratan teknis maupun administratif; (2) Sistem, Mekanisme, dan Prosedur, adalah tata cara pelayanan yang dibakukan dalam pelayanan; (3) Waktu Penyelesaian, adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan; (4) Biaya/Tarif, adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan; (5) Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan, adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan; (6) Kompetensi Petugas, adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh petugas seperti pengetahuan, keahlian, ketrampilan, dan pengalaman; (7) Perilaku Petugas, adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan; (8) Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan, adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut; dan (9) Sarana dan Prasarana, adalah alat dan penunjang utama terselenggaranya suatu proses dalam pelayanan. Dengan dilakukannya SKM dengan penilai kesembilan unsur diatas maka dapat diketahui kelemahan atau kekurangan dari masing-masing unsur dalam penyelenggaraan pelayanan publik, serta dapat diketahui kinerja penyelenggaraan pelayanan dan nantinya dapat digunakan sebagai bahan penetapan kebijakan yang perlu diambil.

f. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tabel

Tabel 28. Realisasi anggaran mendukung IKU

IKU	Capaian	Alokasi Anggaran (RARO)	Realisasi Anggaran (RARO)	AARO x CRO	(AARO x CRO) RARO
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3)x(2)	(6)= (5)-(4)
Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambengan	106,15%	14.230.000	-	15.105.072	15.105.072

Pada Triwulan I Tahun 2024, realisasi penyerapan anggaran untuk mendukung capaian indikator Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan sebesar Rp 15.105.072,- Sedangkan efisiensi penggunaan anggaran sebesar 106,15%. SDM yang menunjang terlaksananya capaian Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan adalah penanggung jawab masing-masing kriteria pada masing-masing tim dan operator Si Susun sehingga penggunaan SDM untuk kegiatan ini sudah efisien.

g. Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Pelaksanaan SKM dilakukan sepanjang tahun kegiatan dan dilaporkan hasilnya setiap triwulan. Beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan dalam mendukung pelayanan publik yaitu dilaksanakan perbaikan terhadap fasilitas sarana dan prasarana pelayanan, dan peningkatan kompetensi petugas pelayanan melalui bimbingan teknis. Tidak hanya itu, kegiatan lain yang telah dilaksanakan yaitu sosialisasi mengenai prosedur pelayanan dan standar pelayanan terhadap pengguna jasa

B. Akuntabilitas Keuangan

Pada 2024 ini Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan mendapatkan alokasi anggaran APBN sebesar **15.094.595.000,-** yang diperoleh untuk menjalankan kegiatan yang telah disusun yakni sebagai berikut :

Tabel 29. Pagu Anggaran Berdasarkan Jenis Kegiatan TA 2024

KODE AKUN	URAIAN	PAGU	TARGET TW 1	
			TARGET	% PAGU
032.03.HB	Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	3.517.716.000	398.349.000	11,32%
2337	Pengelolaan Kapal Perikanan, Alat Penangkapan Ikan dan Pengawakan Kapal Perikanan	38.000.000	25.000.000	65,79%
2337.ACA	Perizinan Produk[Base Line]	25.000.000	25.000.000	100,00%
2337.ACA.001	Dokumen kapal perikanan yang diterbitkan	25.000.000	25.000.000	100,00%
2337.BDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat[Base Line]	13.000.000	0	0,00%

2337.BDC.001	Nelayan/awak kapal perikanan yang ditingkatkan pengetahuannya/kompetensinya di bidang sarana penangkapan ikan	13.000.000	0	0,00%
2338	Pengelolaan Pelabuhan Perikanan	3.388.402.000	372.549.000	10,99%
2338.ABR	Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan[Base Line]	150.000.000	0	0,00%
2338.ABR.001	Rekomendasi kebijakan/perencanaan pembangunan/pengembangan pelabuhan perikanan yang disusun	150.000.000	0	0,00%
2338.BGA	Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Ekonomi[Base Line]	1.750.402.000	269.948.000	15,42%
2338.BGA.002	Pelabuhan perikanan UPT Pusat dan Perintis yang dikelola dan operasional sesuai standar	1.750.402.000	269.948.000	15,42%
2338.RAL	Sarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan[Base Line]	75.000.000	61.500.000	82,00%
2338.RAL.001	Sarana penunjang pemungutan PNBK Perikanan Tangkap yang disediakan	75.000.000	61.500.000	82,00%
2338.RBQ	Prasarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan[Base Line]	1.413.000.000	41.101.000	2,91%
2338.RBQ.001	Pelabuhan perikanan UPT Pusat dan PP Perintis yang ditingkatkan fasilitasnya untuk mendukung Penangkapan Ikan Terukur	1.000.000.000	27.001.000	2,70%
2338.RBQ.003	Pelabuhan Perikanan yang terintegrasi dan bertaraf internasional yang dikembangkan - IFP IFM I	413.000.000	14.100.000	3,41%
2339	Pengelolaan Perizinan dan Kenelayanan	8.000.000	800.000	10,00%
2339.QDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat[Base Line]	8.000.000	800.000	10,00%
2339.QDC.003	Nelayan yang difasilitasi akses pendanaan usahanya	8.000.000	800.000	10,00%
2341	Pengelolaan Sumber Daya Ikan	83.314.000	0	0,00%
2341.QKB	Pemantauan produk[Base Line]	83.314.000	0	0,00%
2341.QKB.001	Laporan data logbook penangkapan Ikan yang dikumpulkan dan diverifikasi	83.314.000	0	0,00%
032.03.WA	Program Dukungan Manajemen	11.576.879.000	2.911.301.576	25,15%
2342	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Perikanan Tangkap	11.576.879.000	2.911.301.576	25,15%
2342.CAN	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi[Base Line]	168.856.000	57.834.000	34,25%
2342.CAN.955	Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	168.856.000	57.834.000	34,25%
2342.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal[Base Line]	10.953.376.000	2.790.747.576	25,48%
2342.EBA.960	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	34.000.000	0	0,00%
2342.EBA.963	Layanan Data dan Informasi	18.000.000	0	0,00%
2342.EBA.994	Layanan Perkantoran	10.901.376.000	2.790.747.576	25,60%

2342.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal[Base Line]	160.507.000	0	0,00%
2342.EBB.951	Layanan Sarana Internal	160.507.000	0	0,00%
2342.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal[Base Line]	55.000.000	27.980.000	50,87%
2342.EBC.954	Layanan Manajemen SDM	55.000.000	27.980.000	50,87%
2342.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal[Base Line]	239.140.000	34.740.000	14,53%
2342.EBD.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	60.000.000	0	0,00%
2342.EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	39.000.000	11.420.000	29,28%
2342.EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan	140.140.000	23.320.000	16,64%
		15.094.595.000	3.309.650.576	21,93%

Dari pagu anggaran tersebut di atas, realisasi keuangan Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan sampai dengan Triwulan 1 Tahun 2024 dalam rangka mendukung pelaksanaan program- program kegiatannya telah terealisasi sebesar Rp. Rp 3.068.596.737,- atau 20,32%

Tabel 30. Realisasi Keuangan PPN Pengembangan s/d Triwulan I Tahun 2024

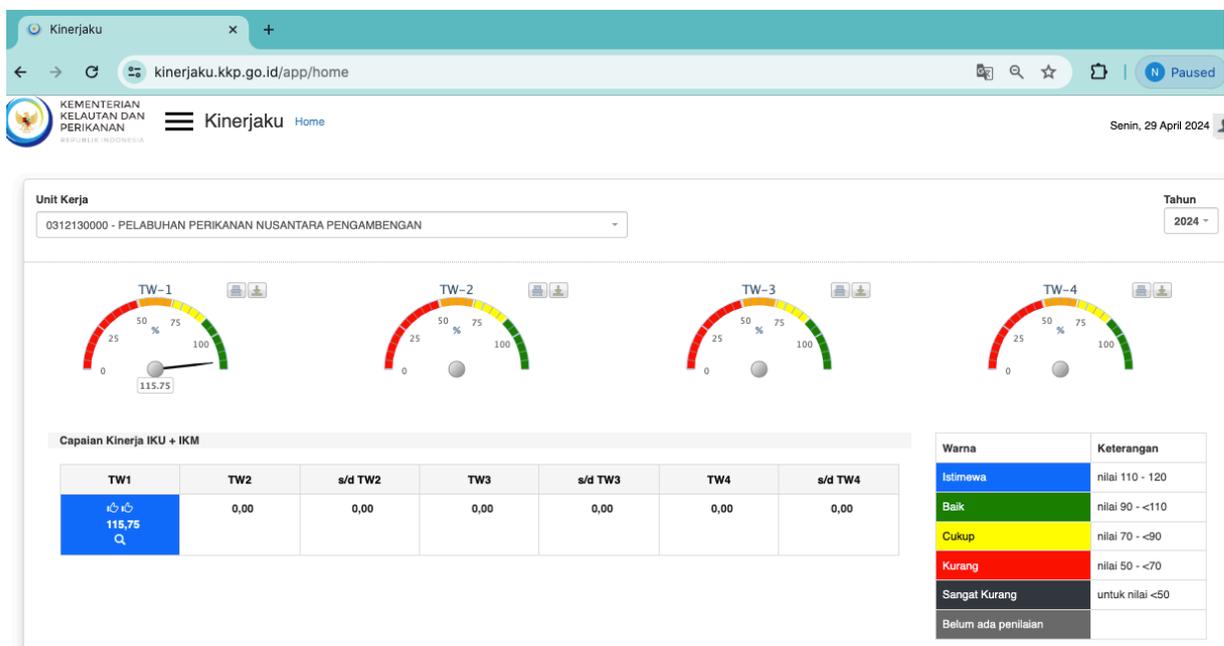
KODE AKUN	URAIAN	PAGU	REALISASI TW 1		
			REALISASI	% TARGET	% PAGU
032.03.HB	Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	3.517.716.000	306.245.707	76,88%	8,71%
2337	Pengelolaan Kapal Perikanan, Alat Penangkapan Ikan dan Pengawakan Kapal Perikanan	38.000.000	17.471.953	69,89%	45,98%
2337.ACA	Perizinan Produk[Base Line]	25.000.000	17.471.953	69,89%	69,89%
2337.ACA.001	Dokumen kapal perikanan yang diterbitkan	25.000.000	17.471.953	69,89%	69,89%
2337.BDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat[Base Line]	13.000.000	0		0,00%
2337.BDC.001	Nelayan/awak kapal perikanan yang ditingkatkan pengetahuannya/kompetensinya di bidang sarana penangkapan ikan	13.000.000	0		0,00%
2338	Pengelolaan Pelabuhan Perikanan	3.388.402.000	288.773.754	77,51%	8,52%
2338.ABR	Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan[Base Line]	150.000.000	2.700.000		1,80%
2338.ABR.001	Rekomendasi kebijakan/perencanaan pembangunan/pengembangan pelabuhan perikanan yang disusun	150.000.000	2.700.000		1,80%
2338.BGA	Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Ekonomi[Base Line]	1.750.402.000	204.773.426	75,86%	11,70%
2338.BGA.002	Pelabuhan perikanan UPT Pusat dan Perintis yang dikelola dan operasional sesuai standar	1.750.402.000	204.773.426	75,86%	11,70%
2338.RAL	Sarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan[Base Line]	75.000.000	54.100.000	87,97%	72,13%

2338.RAL.001	Sarana penunjang pemungutan PNPB Perikanan Tangkap yang disediakan	75.000.000	54.100.000	87,97%	72,13%
2338.RBQ	Prasarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan[Base Line]	1.413.000.000	27.200.328	66,18%	1,93%
2338.RBQ.001	Pelabuhan perikanan UPT Pusat dan PP Perintis yang ditingkatkan fasillitasnya untuk mendukung Penangkapan Ikan Terukur	1.000.000.000	27.200.328	100,74%	2,72%
2338.RBQ.003	Pelabuhan Perikanan yang terintegrasi dan bertaraf internasional yang dikembangkan - IFP IFM I	413.000.000	0	0,00%	0,00%
2339	Pengelolaan Perizinan dan Kenelayanan	8.000.000	0	0,00%	0,00%
2339.QDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat[Base Line]	8.000.000	0	0,00%	0,00%
2339.QDC.003	Nelayan yang difasilitasi akses pendanaan usahanya	8.000.000	0	0,00%	0,00%
2341	Pengelolaan Sumber Daya Ikan	83.314.000	0		0,00%
2341.QKB	Pemantauan produk[Base Line]	83.314.000	0		0,00%
2341.QKB.001	Laporan data logbook penangkapan ikan yang dikumpulkan dan diverifikasi	83.314.000	0		0,00%
032.03.WA	Program Dukungan Manajemen	11.576.879.000	2.762.351.030	94,88%	23,86%
2342	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Perikanan Tangkap	11.576.879.000	2.762.351.030	94,88%	23,86%
2342.CAN	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi[Base Line]	168.856.000	55.650.000	96,22%	32,96%
2342.CAN.955	Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	168.856.000	55.650.000	96,22%	32,96%
2342.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal[Base Line]	10.953.376.000	2.626.097.556	94,10%	23,98%
2342.EBA.960	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	34.000.000	0		0,00%
2342.EBA.963	Layanan Data dan Informasi	18.000.000	1.230.000		6,83%
2342.EBA.994	Layanan Perkantoran	10.901.376.000	2.624.867.556	94,06%	24,08%
2342.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal[Base Line]	160.507.000	36.234.660		22,58%
2342.EBB.951	Layanan Sarana Internal	160.507.000	36.234.660		22,58%
2342.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal[Base Line]	55.000.000	4.126.000	14,75%	7,50%
2342.EBC.954	Layanan Manajemen SDM	55.000.000	4.126.000	14,75%	7,50%
2342.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal[Base Line]	239.140.000	40.242.814	115,84%	16,83%
2342.EBD.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	60.000.000	0		0,00%
2342.EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	39.000.000	14.019.258	122,76%	35,95%
2342.EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan	140.140.000	26.223.556	112,45%	18,71%
		15.094.595.000	3.068.596.737	92,72%	20,33%

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan Triwulan I Tahun 2024 menyajikan capaian strategis organisasi yang tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU). Dengan target sebesar Rp 15.094.595.000,- pada Tahun 2024, yang terealisasi sebesar Rp 3.068.596.737,- atau 20,32% dari total target penyerapan anggaran pada Triwulan I Tahun 2024. Sedangkan secara kinerja dengan hasil capaian sasaran strategis yang ditetapkan secara umum dan dapat memenuhi target dengan Nilai Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) ditambahkan dengan Nilai Indikator Kinerja (IK) sebesar **115,75%**. (Sesuai dashboard pada Aplikasi Kinerjaku pada Gambar 1)



Gambar 1. Dashboard pada aplikasi Kinerjaku Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan Triwulan I Tahun 2024

Dari hasil pengukuran kinerja Ditjen Perikanan Tangkap dan UPT Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan s/d Triwulan I Tahun 2024 melalui pencapaian target indikator kinerja yang di input ke dalam Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan KINERJAKU, diperoleh hasil indikator yang memenuhi target yaitu sebagai berikut :

1. IKS.01.01 Penerimaan PNBP Non SDA di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan (Rp Juta)
2. IKS.02.02 Volume produksi perikanan tangkap di PPN Pengembangan (Ton)

4. IKS.03.02 Tingkat Kinerja PPN Pengambengan (Nilai)
7. IKS.04.02 Nilai Pengendalian Lingkungan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambengan (Nilai)
8. IKS.05.01 Kapal Perikanan izin daerah yang memenuhi ketentuan (Kapal)
11. IKS.07.02 Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambengan (Persen)
18. IKS.07.09 Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambengan (Indeks)

Kemudian untuk indikator lainnya belum dinilai pada Triwulan I tahun 2024, antara lain :

3. IKS.03.01 Persentase permohonan perusahaan yang dianalisa dan/atau dievaluasi di PPN Pengambengan (Persen)
5. IKS.03.03 Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambengan (Persen)
6. IKS.04.01 Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambengan (Persen)
9. IKS.06.01 Persentase Peningkatan Pengetahuan Kompetensi dan Perlindungan Nelayan/Awak Kapal Perikanan (Persen)
10. IKS.07.01 Nilai Pembangunan Zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambengan (Nilai)
12. IKS.07.03 Nilai Rekonsiliasi kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambengan (Nilai)
13. IKS.07.04 Indeks Profesionalitas ASN di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambengan (Indeks)
14. IKS.07.05 Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambengan (Persen)
15. IKS.07.06 Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambengan (Persen)
16. IKS.07.07 Nilai IKPA Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambengan (Nilai)

17. IKS.07.08 Nilai Kinerja Anggaran Pelabuhan Perikanan Nusantara
Pengembangan (Nilai)

B. Saran

Berdasarkan hasil pembahasan pencapaian indikator kinerja sebagaimana pada Bab II di atas, hal – hal yang dapat disarankan untuk perbaikan pengelolaan kinerja lingkup Ditjen Perikanan Tangkap adalah sebagai berikut :

- a) Memaksimalkan segala potensi-potensi SDM serta sarana prasarana yang telah dimiliki untuk mencapai target yang ditentukan.
- b) Memaksimalkan anggaran yang dimiliki untuk mencapai output sesuai dengan program yang telah dicanangkan.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJ) Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan Triwulan I Tahun 2024 ini disampaikan sebagai tolak ukur kinerja pelabuhan dan bahan kajian evaluasi serta koreksi dalam rangka pembangunan dan pengembangan unit kerja di masa yang akan datang.